

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah menjadi isu lingkungan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Semakin tinggi aktivitas ekonomi dan gaya hidup modern, semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Di Indonesia, persoalan tersebut telah lama menjadi tantangan serius karena sebagian besar sampah belum dikelola secara optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa aktivitas sehari-hari manusia atau hasil proses alami yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan barang yang tidak lagi digunakan dan dibuang, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif (Yuwana dan Adlan, 2021). Selanjutnya, menurut Pasal 12, setiap individu bertanggung jawab untuk mengelola sampah rumah tangga dan sampah serupa dengan menerapkan cara-cara yang ramah lingkungan, serta mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Persoalan sampah di Indonesia merupakan tantangan lingkungan yang sangat kompleks akibat terjadi pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas sosial yang terus meningkat. Oleh sebab itu, dinamika kehidupan bermasyarakat yang beragam turut menimbulkan perubahan volume, jenis, dan karakteristik sampah

yang semakin kompleks (Permendagri Nomor 33 Tahun 2010). Dalam beberapa negara berkembang, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga telah memengaruhi peningkatan timbulan sampah (Sekarsari *et al.*, 2023). Meningkatnya sampah tersebut juga dapat menjadi sebuah bencana apabila tidak diikuti dengan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Beberapa masalah lingkungan yang dapat timbul akibat pengelolaan sampah yang buruk adalah pencemaran air dan tanah, penyumbatan saluran drainase, serta peningkatan emisi gas rumah kaca akibat proses pembakaran dan dekomposisi sampah di tempat pembuangan akhir (Ramadhanti *et.al*, 2021). Kondisi tersebut juga tercermin di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah dan khususnya Kota Semarang, yang menjadi salah satu wilayah dengan timbulan sampah tertinggi di Indonesia.

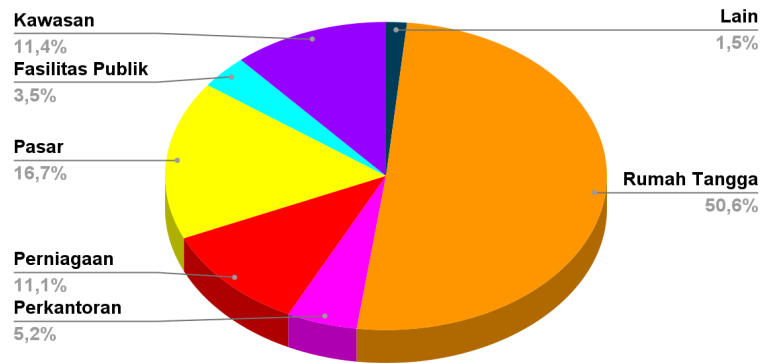
Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah pernah menjadi provinsi dengan timbulan sampah tertinggi di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan data dari SIPSN (2025), pada tahun 2020 Jawa Tengah menghasilkan 4,2 juta ton sampah, meningkat menjadi 5 juta ton di tahun 2021, dan mencapai 5,9 juta ton pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024 Jawa Tengah turun ke peringkat keempat dengan total timbulan sampah tahunan sebesar 2,56 juta ton, di bawah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

Tabel 1.1 Volume Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2020-2024

Tahun	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2020	1,276.74	466,010.79
2021	1,180.14	430,749.75
2022	1,181.06	431,085.22
2023	1,182.29	431,534.65
2024	1,189.71	434,243.97

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025

Meskipun telah terjadi penurunan, akan tetapi Kota Semarang sebagai kota metropolitan di Indonesia terus mengalami kenaikan timbulan sampah tiap tahunnya. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, produksi sampah harian di Kota Semarang mencapai 1,18 ribu ton atau sekitar 434,24 ribu ton per tahun (SIPSN, 2025). Adapun porsi terbesar timbulan tersebut berasal dari sampah rumah tangga dan plastik sekali pakai. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat perkotaan masih sangat bergantung pada produk berbahan plastik. Sampah plastik menyumbang 12% sebagai komponen penyebab pencemaran lingkungan dan jumlah tersebut diprediksi akan mencapai angka 70% pada tahun 2050 (Bustan, 2024).



Gambar 1.1 Komposisi Sampah Nasional Berdasarkan Sumber Sampah Tahun 2024

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa di Indonesia, sampah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dari total timbulan sampah nasional. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN, 2024), sekitar 50,6% dari total sampah nasional berasal dari sampah rumah tangga, diikuti oleh sektor pasar (16,67%) dan kawasan (11,42%). Adapun sampah plastik menjadi salah satu komponen di dalam sampah rumah tangga, yakni mencapai 19,74%, setelah sampah sisa makanan sebesar 39,08%.

Rukmana (2021) menyebutkan bahwa plastik merupakan salah satu material yang sulit terurai secara alami dan membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terdegradasi. Selain itu, plastik memiliki karakteristik ringan dan mudah terbawa oleh angin atau air, sehingga sering mencemari lingkungan, bahkan sebelum mencapai tempat pembuangan akhir. Kompleksitas pengelolaan sampah plastik juga diperparah oleh rendahnya tingkat daur ulang, keterbatasan teknologi pengolahan, serta masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap produk plastik sekali pakai (Abbas *et al.*, 2024).

Apabila sampah plastik dibakar secara tradisional, maka hasil pembakaran tersebut akan mengeluarkan emisi dioksin (*Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins*) yang merupakan salah satu senyawa organik aromatik terklorinasi yang sangat beracun dan menjadi penyebab kanker. Selain itu, zat yang terkandung dalam pembakaran plastik juga meningkatkan risiko perubahan fungsi hati dan metabolisme lipid, penurunan sistem kekebalan tubuh, hingga gangguan sistem endokrin dan saraf (Priyadi *et al.*, 2023). Rachman *et al.* (2024) juga menegaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang pesat turut berkontribusi pada lonjakan produksi sampah, termasuk sampah jenis plastik, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih ketat untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengurangan konsumsi plastik menjadi langkah penting dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, khususnya bagi Kota Semarang.

Menyadari besarnya ancaman lingkungan akibat sampah plastik, Pemerintah Kota Semarang merespons dengan menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik sebagai upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di berbagai sektor, termasuk di kalangan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2), kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dengan melarang penyediaan kantong plastik secara gratis di sektor ritel *modern*, pusat perbelanjaan, dan restoran.

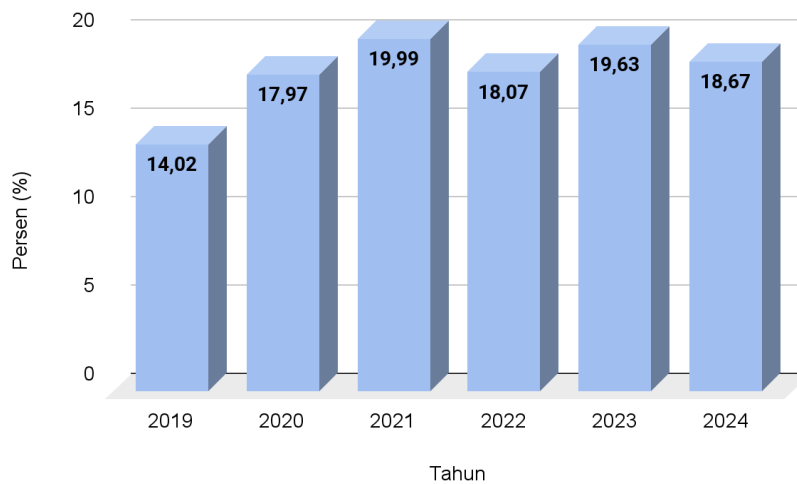
Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) dalam Peraturan Walikota (Perwal) Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik,

pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan pariwisata.

Dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 disebutkan bahwa pelaku usaha wajib mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mengutamakan penggunaan kemasan ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Ketentuan tersebut secara langsung menempatkan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai salah satu subjek utama kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan berbagai upaya, seperti sosialisasi kepada pelaku usaha, edukasi pemilahan sampah dari sumber, penguatan bank sampah, *monitoring* pelaksanaan kebijakan, serta kampanye perubahan perilaku masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi lingkungan, seperti gerakan Semarang Bersih. Berbagai upaya tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mendorong pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Adapun Pemerintah Kota Semarang juga mengencarkan pembentukan bank sampah yang berperan sebagai pusat pengumpulan dan pengelolaan sampah anorganik, serta menjadi media pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan di masyarakat. Melalui mekanisme tabungan sampah, masyarakat dan pelaku

UMKM dapat menyetorkan sampah plastik yang telah dipilah untuk memperoleh insentif atau manfaat ekonomi sebagai hasil pengelolaan sampah yang berkelanjutan.



Gambar 1.2 Peningkatan Jumlah Sampah Plastik di Kota Semarang

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025

Namun, meskipun Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan berbagai upaya implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019, seperti sosialisasi, edukasi, penguatan bank sampah, dan gerakan Semarang Bersih, tingkat timbulan sampah plastik di Kota Semarang masih tergolong tinggi. Berdasarkan Gambar 1.2, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa penggunaan plastik di Kota Semarang mengalami fluktuasi. Adapun sampah plastik merupakan penyumbang sampah terbanyak kedua setelah sampah sisa makanan dengan persentase 18,67% pada tahun 2024.

Secara grafik, pada tahun 2022 hingga 2024 volume sampah plastik cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021, akan tetapi jumlah sampah plastik yang dihasilkan masih cukup tinggi. Hal tersebut mencerminkan

bahwa kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang masih belum optimal. Sementara itu, dilansir dari redaksi Halo Semarang, Pemerintah Kota Semarang juga mengencakan pembentukan 1000 unit bank sampah yang tersebar di wilayah Kota Semarang, akan tetapi hingga tahun 2025, bank sampah yang aktif beroperasi hanya sebanyak 664 unit dan rumah tangga yang terlibat hanya sebesar 48% atau sebanyak 278.006 keluarga.

Tabel 1.2 Persebaran Penduduk dan Luas Wilayah Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

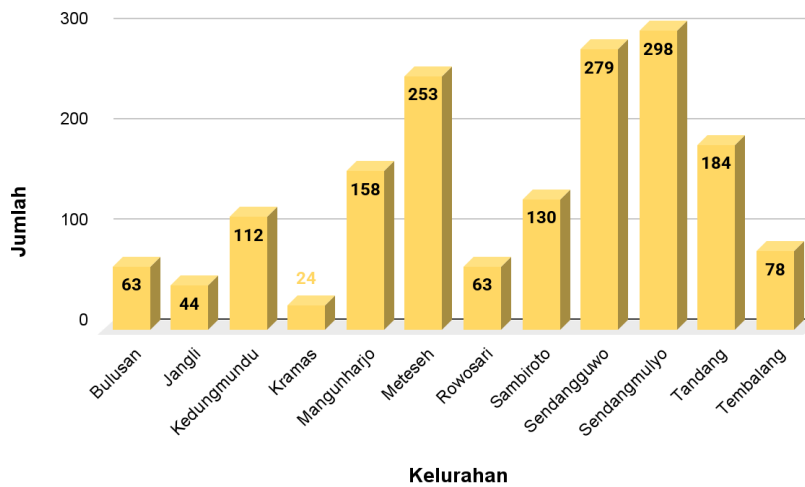
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2024 (ribu jiwa)	Luas Wilayah (km ²)
1.	Candisari	75.442	6,40
2.	Semarang Utara	117.865	11,39
3.	Pedurungan	197.468	21,11
4.	Semarang Barat	149.327	21,68
5.	Genuk	137.356	25,98
6.	Banyumanik	143.746	29,74
7.	Tembalang	194.431	39,47
8.	Ngaliyan	146.628	42,99
9.	Mijen	93.088	56,52
10.	Gunungpati	101.577	58,27
Kota Semarang		1.708.833	373,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2025

Kecamatan Tembalang merupakan salah satu kawasan di Kota Semarang yang mengalami tantangan besar dalam penerapan kebijakan pengurangan plastik. Berdasarkan Tabel 1.2 yang memuat data Badan Pusat Statistik Kota Semarang

(2024), Kecamatan Tembalang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang cukup padat, yaitu mencapai 194.431 ribu jiwa pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,67% per tahun 2020-2024. Selain itu, Kecamatan Tembalang juga memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Maka dari itu, kepadatan penduduk yang mencapai 4,8 ribu jiwa/km² tersebut akan menghasilkan timbulan sampah yang sangat tinggi apabila tidak dikelola dengan baik (Atmadewi, 2023). Mobilitas dan aktivitas konsumsi yang tinggi di daerah Kecamatan Tembalang juga menjadikannya salah satu wilayah dengan tingkat penggunaan plastik yang signifikan.

Berdasarkan data dari BPS Kota Semarang (2024), sampah berjenis plastik di Kecamatan Tembalang menyumbang sebesar 17,20% dari total sampah yang ditimbulkan pada tahun 2023, yaitu sebanyak 158,2 m³. Angka tersebut mengalami sedikit kenaikan dibandingkan pada tahun 2021, yang tercatat sebesar 17,19%. Adapun peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya aktivitas ekonomi serta gaya hidup masyarakat yang masih banyak bergantung pada produk berbahan plastik sekali pakai dan *styrofoam*.

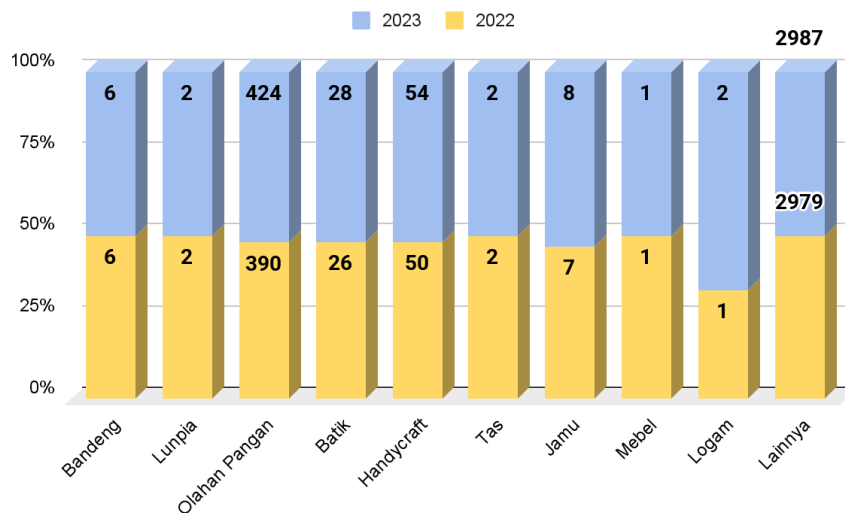


Gambar 1.3 Jumlah Pelaku Usaha di Kecamatan Tembalang Periode Juli 2020 - Januari 2021

Sumber: Portal Data Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan Gambar 1.3, jumlah pelaku usaha di Kecamatan Tembalang pada Juli 2020 hingga Januari 2021 terdapat sebanyak 1.686 pelaku usaha. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas selama masa pandemi Covid-19, yakni masyarakat cenderung melakukan *work from home* (WFH) dan melakukan belanja secara *online*. Oleh karena itu, pembungkus produk berbahan plastik yang dihasilkan dari kegiatan belanja tersebut menimbulkan meningkatnya sampah plastik di Kecamatan Tembalang. Menurut penelitian Chahyanto *et al.* (2024), Kecamatan Tembalang merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan populasi yang padat. Hal tersebut juga dapat dilihat melalui fenomena menjamurnya kafe maupun sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya di Kecamatan Tembalang yang menandakan bahwa terdapat peningkatan permintaan konsumen dan tingginya penggunaan kantong

plastik sekali pakai, *cup* plastik, hingga pipet atau sedotan plastik dalam kegiatan operasionalnya.



Gambar 1.4 Perkembangan Pelaku UMKM Kecamatan Tembalang

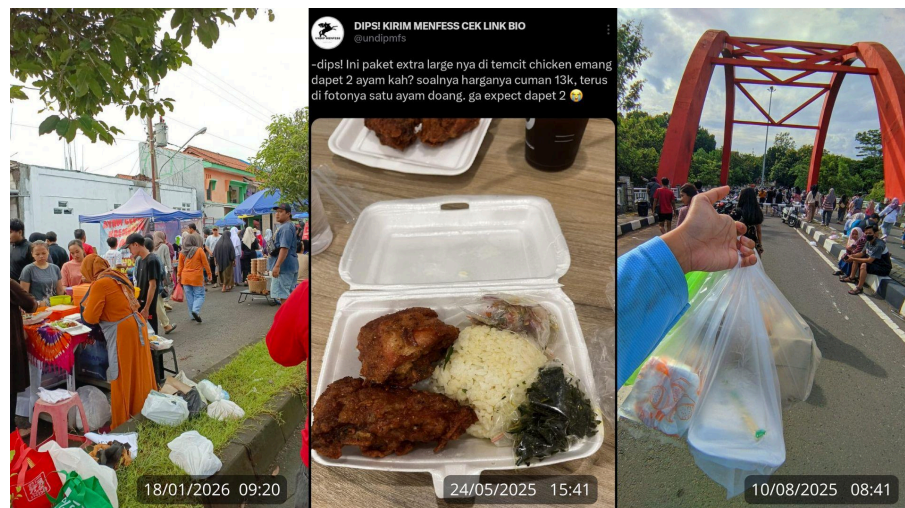
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (Diolah Peneliti), 2023

Kecamatan Tembalang merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang yang mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data pada Gambar 1.4, jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Tembalang mengalami tren peningkatan yang positif dari 3.464 di tahun 2022 menjadi 3.514 di tahun 2023. Meningkatnya pelaku usaha UMKM tersebut diakibatkan oleh berkembangnya kawasan permukiman serta keberadaan sejumlah perguruan tinggi yang menjadikan Kecamatan Tembalang sebagai pusat aktivitas masyarakat dan mahasiswa. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi sekaligus berpotensi meningkatkan timbulan sampah dari kegiatan rumah tangga maupun kegiatan usaha (Siswanto *et al.*, 2025).

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (2024), Kecamatan Tembalang menghasilkan timbulan sampah sebesar 135.253 kg/hari

dengan jumlah penduduk sebanyak 194.431 jiwa. Sementara itu, Kelurahan Bulusan sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan Tembalang memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.544 jiwa pada tahun 2024 (BPS Kota Semarang, 2024). Berdasarkan perbandingan proporsi jumlah penduduk tersebut, estimasi timbulan sampah di Kelurahan Bulusan mencapai sekitar 4,55 ton per hari. Meskipun angka tersebut merupakan hasil estimasi berdasarkan proporsi jumlah penduduk dan bukan data pengukuran langsung, akan tetapi hasil tersebut memberikan gambaran bahwa Kelurahan Bulusan turut memberikan kontribusi terhadap timbulan sampah di Kecamatan Tembalang sehingga layak dipilih sebagai lokasi penelitian.

Selain memiliki potensi timbulan sampah yang relatif tinggi, Kelurahan Bulusan juga merupakan kawasan yang didominasi oleh aktivitas pendidikan dan perdagangan sehingga terdapat banyak pelaku UMKM, khususnya di bidang kuliner. Aktivitas usaha tersebut berpotensi menghasilkan sampah plastik karena masih banyak menggunakan kemasan sekali pakai dalam kegiatan operasionalnya.



Gambar 1.5 Penggunaan Kemasan Berbahan Plastik dan *Styrofoam*

Sumber: Data diolah peneliti dan diakses melalui Twitter (X), 2026

Berdasarkan Gambar 1.5, diketahui bahwa beberapa pelaku usaha UMKM di Kelurahan Bulusan masih marak menggunakan kemasan berbahan dasar plastik sekali pakai dan *styrofoam* dalam operasional usahanya. Jenis kemasan tersebut umumnya digunakan pada produk kuliner, seperti minuman *cup* plastik, kotak *styrofoam* untuk makanan, hingga kantong plastik untuk membungkus produk dan pesanan konsumen, terutama saat konsumen membawa pulang makanan atau melakukan *take away* melalui layanan pesan antar makanan. Berdasarkan data dari *Goodstat* (2022), mayoritas anak muda Indonesia menggunakan *platform GoFood* sebesar 46,4%, *ShopeeFood* sebesar 25,2%, *GrabFood* sebesar 22%, dan lainnya sebesar 6,4% untuk memesan makanan secara *online*.

Tingginya penggunaan plastik sekali pakai dan *styrofoam* oleh pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan menunjukkan bahwa praktik penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan masih cukup tinggi di tingkat pelaku UMKM, terutama yang bergerak di sektor kuliner. Maka dari itu, program pengendalian penggunaan plastik yang dilakukan di Kota Semarang belum sepenuhnya menjangkau pelaku usaha UMKM.



Gambar 1.6 Kondisi TPS Tembalang dan Lingkungan UMKM Kelurahan Bulusan Tahun 2025

Sumber: Pantau Semar, 2025

Adapun timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kelurahan Bulusan seluruhnya dibuang ke TPS Tembalang. Berdasarkan kamera CCTV Pantau Semar pada Gambar 1.6, TPS Tembalang hanya memiliki tiga kontainer yang masing-masing kontainer tersebut dipenuhi oleh sampah plastik hingga mengalami *overload*. Meskipun Pemerintah Kota Semarang telah mengencangkan kegiatan pilah sampah melalui bank sampah, akan tetapi masyarakat hingga saat ini masih membuang sampah plastik tanpa dipilah. Hal tersebut juga didukung oleh terbatasnya fasilitas pilah sampah di sekitar lingkungan UMKM Kelurahan Bulusan, salah satunya terlihat di sepanjang Jalan Gondang Raya yang memiliki banyak pelaku usaha UMKM.



Gambar 1.7 Kegiatan Bank Sampah di Lingkungan Kelurahan Bulusan

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Demikian pula kondisi pengelolaan bank sampah di Kelurahan Bulusan. Berdasarkan Gambar 1.7, terlihat bahwa di wilayah Kelurahan Bulusan telah tersedia bank sampah yang difungsikan sebagai sarana pengumpulan sampah anorganik, termasuk plastik dari aktivitas rumah tangga dan usaha. Keberadaan bank sampah tersebut dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan menjadi bagian dari upaya penerapan program pengelolaan sampah berbasis partisipasi di Kelurahan Bulusan.

Namun, distribusi dan tingkat keaktifan bank sampah di setiap wilayah belum sepenuhnya merata. Beberapa wilayah di Kelurahan Bulusan, seperti RW 2, tidak ditemukan adanya bank sampah yang aktif di tingkat RW (Rukun Warga). Meskipun pihak Kelurahan Bulusan menyatakan kondisi tersebut terkompensasi oleh inisiatif mandiri di tingkat RT (Rukun Tetangga), tetapi hal tersebut menyebabkan jangkauan program menjadi terbatas pada kelompok warga tertentu saja. Pola kelembagaan yang hanya mengandalkan inisiatif lokal di tingkat RT dikhawatirkan tidak mampu merangkul seluruh pelaku usaha di wilayah tersebut, terutama mereka yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas sosial warga asli.

Sementara itu, hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa pemanfaatan bank sampah oleh pelaku UMKM masih terbatas. Keanggotaan dan aktivitas bank sampah cenderung didominasi oleh masyarakat non-pelaku usaha, sedangkan partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan pemilahan dan penyaluran sampah anorganik belum optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan dan inisiatif bank sampah belum sepenuhnya diikuti oleh keterlibatan aktif pelaku usaha sebagai salah satu penghasil sampah plastik, sehingga tujuan pengendalian sampah plastik pada tingkat pelaku usaha masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 pada pelaku usaha UMKM di Kelurahan Bulusan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai aspek implementasi kebijakan, mulai dari kesesuaian konteks kebijakan, ketersediaan sumber daya, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Hal tersebut diperlukan karena

permasalahan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan belum optimalnya hasil kebijakan, tetapi juga mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, sumber daya manusia, serta pelaksanaan sosialisasi dan *monitoring* yang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Model Evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1966) karena mampu mengevaluasi pelaksanaan program secara komprehensif melalui aspek *context*, *input*, *process*, dan *product*. Selain itu, indikator *outcomes* yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis (2000) juga digunakan untuk menilai perubahan perilaku pelaku UMKM sebagai sasaran kebijakan setelah pelaksanaan program. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul **“Evaluasi Program Pengendalian Sampah Plastik pada Pelaku Usaha UMKM di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang”**.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan plastik sekali pakai dan *styrofoam* oleh pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan masih relatif tinggi meskipun kebijakan pengendalian plastik telah diterapkan.
- 2) Partisipasi pelaku usaha UMKM dalam kegiatan pengendalian sampah plastik, seperti pemilahan dan penyaluran sampah anorganik belum optimal.

- 3) Ketersediaan fasilitas dan dukungan dalam pengelolaan sampah plastik di tingkat kelurahan masih terbatas.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik berdasarkan Perwal Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 pada pelaku usaha UMKM di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang?
- 2) Apa faktor penghambat dalam keberhasilan pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik pada pelaku usaha UMKM di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik berdasarkan Perwal Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 oleh pelaku usaha UMKM di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
- 2) Menganalisis faktor-faktor yang berperan sebagai penghambat dalam keberhasilan pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik

pada pelaku usaha UMKM di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian evaluasi program dalam ilmu Administrasi Publik, khususnya pada isu pengelolaan lingkungan di tingkat lokal.
- 2) Memberikan penerapan konkret atas Model Evaluasi CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam serta indikator *outcomes* Bridgman dan Davis dalam menganalisis program pemerintah daerah, dengan fokus pada pencapaian hasil, efektivitas, dan dampak pelaksanaan program terhadap tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Menambah referensi akademik terkait efektivitas program pengurangan sampah plastik berbasis kebijakan daerah dan partisipasi masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dalam mengkaji program lingkungan serupa, baik dengan pendekatan evaluasi program maupun kebijakan publik lainnya.
- 2) Bagi Instansi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup

Penelitian yang dilakukan mampu memberikan masukan evaluatif untuk melihat kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik, serta merumuskan strategi peningkatan kedepannya.

3) Bagi Universitas Diponegoro

Penelitian yang dilakukan dapat menambah referensi di perpustakaan FISIP Universitas Diponegoro dan digunakan untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengurangan penggunaan produk berbahan plastik melalui refleksi dari program yang telah dijalankan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Riyana Afil, Kismartini, dan R. Slamet Santoso (2022)	<i>Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori fungsi <i>monitoring</i> menurut William N. Dunn (1999).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan <i>monitoring</i> oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara umum sudah berjalan dengan efektif, meski belum sepenuhnya mencapai seluruh tujuan kebijakan. Berdasarkan keempat fungsi <i>monitoring</i> yang dikemukakan Dunn, fungsi kepatuhan menjadi yang paling belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta masih terdapat petugas yang belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan, terutama dalam penerapan sanksi.	Afila <i>et al.</i> (2022) meneliti efektivitas <i>monitoring</i> kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kota, dengan fokus pada peran pemerintah daerah dan pelaksana kebijakan. Sementara itu, penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada evaluasi hasil program (<i>product</i> dan <i>outcomes</i>) di tingkat pelaku UMKM menggunakan kombinasi Model CIPP dan Bridgman & Davis, sehingga tidak hanya menilai pelaksanaan tetapi juga dampak perilaku dan lingkungan.
2.	Akyas Aryan Permana dan Puji Astuti (2022)	Analisis Implementasi Pengelolaan dan Pengendalian	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah plastik di Kota Semarang belum optimal karena kurangnya koordinasi antarinstansi.	Permana dan Astuti (2022) meneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan dan pengendalian sampah plastik di tingkat kota dengan fokus pada

		Sampah Plastik di Kota Semarang	teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980).		peran pemerintah daerah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi hasil dan dampak program pengendalian plastik di tingkat pelaku UMKM menggunakan kombinasi Model CIPP dan Bridgman & Davis, sehingga menilai tidak hanya proses, tetapi juga efektivitas dan <i>outcomes</i> program.
3.	Junaidy, Sugiannor, Dely Anhar, Akhmad Nikhrawi Hamdie, dan Syahrial Saddiq (2021)	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn.	Berdasarkan indikator efektivitas, pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal karena masih banyak sampah yang tertinggal di TPS di luar batas waktu operasional pembuangan. Sementara itu, pada survei lainnya, pelaksanaannya sudah menunjukkan hasil yang baik.	Junaidy <i>et al.</i> (2021) meneliti tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas pada level masyarakat umum. Sedangkan penelitian ini menilai efektivitas program pengendalian plastik yang diatur dalam Perwal Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019, dengan fokus pada pelaku usaha UMKM dan menggunakan Model Evaluasi CIPP oleh Stufflebeam dan Model Evaluasi Program Bridgman & Davis.
4.	Satrya Raul Neru, Ida Ayu	Implementasi Peraturan	Penelitian ini menggunakan metode	Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 di	Neru <i>et al.</i> (2021) meneliti tentang implementasi kebijakan

	Putu Widiati, dan I Wayan Arthanaya (2021)	Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik pada Pelaku Usaha Pasar Tradisional	penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun penelitian ini memiliki fokus pada tiga landasan kebijakan daerah, yakni landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis.	kalangan pelaku usaha pasar tradisional belum berjalan optimal, karena tidak semua pedagang mampu melaksanakan transaksi tanpa menggunakan kantong plastik. Untuk meningkatkan efektivitas pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Kota Denpasar telah menggelar sosialisasi dan menerapkan sanksi administratif bagi pelanggar.	pengurangan plastik di pasar tradisional di Denpasar. Sedangkan penelitian ini tidak hanya menilai implementasi, tetapi juga mengevaluasi hasil dan dampak dari program pengendalian plastik pada pelaku usaha UMKM di Kelurahan Bulusan dengan pendekatan Evaluasi CIPP Stufflebeam dan Evaluasi Program Bridgman & Davis.
5.	Nada Zairina Wulandari dan Palupi Lindiasari Samputra (2021)	Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin	Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan jenis penelitian survei pengguna yang mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kelurahan Basirih menunjukkan bahwa indeks unit pelayanan mencapai 2,45 dengan nilai konversi interval 61,49, yaitu termasuk ke dalam rentang 25,00–64,99. Hal tersebut menandakan mutu pelayanan berada pada kategori D. Artinya pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik masih tergolong kurang memuaskan.	Wulandari dan Samputra (2021) meneliti tentang efektivitas kebijakan pengurangan plastik di tingkat masyarakat. Sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas program pengendalian plastik di tingkat pelaku usaha dan menilai aspek <i>input, process, product</i> , dan <i>outcomes</i> untuk memperoleh gambaran evaluatif yang lebih komprehensif.
6.	Muhammad Cesar Putra Chahyanto, Sri	Evaluasi Kebijakan Pengendalian	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha, khususnya kafe, belum sepenuhnya memahami isi dan	Chahyanto <i>et al.</i> (2024) meneliti tentang kepatuhan pelaku kafe terhadap kebijakan pengendalian

	Suwitri, dan Dewi Rostyaningsih (2024)	Penggunaan Plastik pada Kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang	dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Bridgman Davis (2000) dan teori evaluasi kebijakan CIPP menurut Daniel L. Stufflebeam (1966).	tujuan dari Perwal tersebut. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi yang menyeluruh, terutama pada usaha kecil dan di daerah terpencil. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha juga masih terbatas pada teguran tertulis atau penempelan stiker tanpa pencabutan izin usaha maupun sanksi tegas lainnya. Adapun masyarakat masih cenderung menggunakan plastik sekali pakai karena kurangnya alternatif yang tersedia dan edukasi. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan insentif, penghargaan, dan pendekatan edukasi yang lebih intensif untuk mengubah kebiasaan masyarakat, serta mempromosikan alternatif ramah lingkungan.	plastik. Sedangkan penelitian ini memperluas konteks ke sektor UMKM secara umum dan menilai efektivitas program melalui pendekatan <i>input, process, dan product</i> menurut Evaluasi CIPP Stufflebeam, serta <i>outcomes</i> menurut Evaluasi Program Bridgman & Davis untuk melihat perubahan perilaku dan dampak lingkungan.
7.	Thi Thanh Thuy Phan, Van Viet Nguyen, Hong Thi Thu Nguyen, Yun-Ju Chen, dan Chun Hung Lee	<i>Evaluating Citizens' Willingness to Participate in Hypothetical Scenarios Towards Sustainable Plastic Waste</i>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis skenario hipotesis. Data dikumpulkan melalui survei terhadap warga negara Vietnam untuk menilai tingkat kesediaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, persepsi risiko lingkungan, dan persepsi manfaat program. Warga menunjukkan kesediaan lebih tinggi untuk terlibat apabila program dilengkapi insentif, sosialisasi yang baik, serta mekanisme partisipasi yang sederhana. Penelitian ini juga	Phan <i>et al.</i> (2023) meneliti tentang kemauan partisipasi warga dalam skenario hipotesis pengelolaan sampah plastik, dengan fokus pada faktor psikologis dan persepsi publik. Sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi program pengendalian penggunaan plastik di Kota

	(2023)	<i>Management</i>	mereka berpartisipasi dalam berbagai skema pengelolaan sampah plastik. Penelitian ini berlandaskan teori perilaku lingkungan (<i>environmental behaviour</i>) serta konsep partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.	menegaskan pentingnya intervensi edukatif dalam meningkatkan perilaku pro-lingkungan.	Semarang, khususnya pada pelaku usaha UMKM, dengan menggunakan Model Evaluasi CIPP dan Evaluasi Program Bridgman & Davis untuk menilai <i>input, process, product</i> , dan <i>outcomes</i> program secara langsung, bukan melalui simulasi perilaku.
8.	Novike Bela Sumanik, Wayrohi Meilvidiri, Lamtiar Siregar, dan Serli Hatul Hidayat (2021)	<i>Public Policy Analysis on Plastic Waste Control in Merauke</i>	Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis berbasis bukti, yang dilakukan dengan menelaah secara kritis berbagai literatur yang membentuk kesadaran lingkungan pada tiap individu.	Temuan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun masyarakat menyadari dampak negatif dari penggunaan plastik, tetapi tingkat konsumsinya masih tinggi. Kebiasaan membawa kantong ramah lingkungan yang sudah umum diterapkan di supermarket ternyata tidak dapat terbawa ke pasar tradisional, sehingga menandakan adanya predisposisi perilaku. Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, namun ketersediaannya belum proporsional dengan jumlah penduduk di Merauke, sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dievaluasi lebih	Sumanik <i>et al.</i> (2021) meneliti tentang analisis kebijakan pengendalian sampah plastik di Kabupaten Merauke secara makro. Sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan program pengendalian plastik di tingkat mikro (kelurahan dan pelaku UMKM) dengan pendekatan evaluatif berbasis hasil, yakni Evaluasi CIPP Stufflebeam dan Evaluasi Program Bridgman & Davis.

				mendalam.	
9.	Yahya Saleh Ibrahim (2021)	<i>Evaluation of Policies and Regulation on Plastic Waste Recycling and Its Impact on the Aesthetic of Kaduna Metropolis</i>	Dalam penelitian ini digunakan pendekatan survei dengan menerapkan teknik kelompok nominal untuk memperoleh data yang akan dianalisis.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah plastik di Kota Metropolitan Kaduna belum mengalami perkembangan yang signifikan sebagaimana yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengumpulan dan pembuangan sampah plastik di wilayah tersebut dinilai masih lemah, ditambah dengan minimnya upaya penegakan hukum yang nyaris tidak berjalan.	Ibrahim (2021) mengevaluasi kebijakan daur ulang plastik terhadap estetika kota di Nigeria. Sedangkan penelitian ini menilai efektivitas dan dampak program pengendalian plastik terhadap perilaku pelaku usaha dan kondisi lingkungan di tingkat lokal, yaitu Kelurahan Bulusan.
10.	Feng Gu, Zhaowei Zhu, dan Sharafat Ali (2023)	<i>Analysis of Factors of Single-Use Plastic Avoidance Behavior for Environmental Sustainability in China</i>	Penelitian ini menggunakan metode <i>cross-sectional</i> dengan pendekatan survei mandiri yang dilakukan dalam satu waktu tertentu untuk memperoleh data terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan teori perilaku terencana (<i>theory of planned behavior</i>).	Studi ini menunjukkan bahwa <i>perceived behavioral control</i> , sikap, dan norma subjektif memiliki pengaruh signifikan terhadap niat masyarakat untuk menghindari plastik sekali pakai. Oleh karena itu, kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan ketiga elemen tersebut. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar pemerintah mengadopsi strategi pendidikan lingkungan yang inovatif dan memanfaatkan media sosial untuk menanamkan nilai-nilai pro-lingkungan.	Gu <i>et al.</i> (2023) meneliti tentang faktor psikologis yang memengaruhi perilaku individu dalam menghindari plastik sekali pakai di Tiongkok. Sedangkan penelitian ini fokus pada evaluasi program pemerintah daerah dalam pengendalian plastik di kalangan pelaku usaha, bukan faktor perilaku individu, dengan pendekatan evaluasi program yang komprehensif.

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berbagai penelitian terdahulu pada Tabel 1.3 telah mengkaji isu pengurangan sampah plastik melalui beragam perspektif, seperti *monitoring* kebijakan (Afila *et al.*, 2022), implementasi kebijakan di tingkat kota dan kabupaten (Permana dan Astuti, 2022; Neru *et al.*, 2021), evaluasi kepatuhan pelaku usaha (Chahyanto *et al.*, 2024; Wulandari & Samputra, 2021), serta analisis perilaku pro-lingkungan masyarakat (Phan *et al.*, 2023; Gu *et al.*, 2023). Meskipun demikian, terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek proses pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi, sementara penilaian terhadap hasil (*product*) dan dampak lanjutan (*outcomes*) program pengendalian penggunaan plastik belum mendapat perhatian yang memadai.

Selain itu, sebagian besar studi dilakukan pada level makro, seperti pemerintah kota, kabupaten, atau lembaga pengambil kebijakan, sehingga kajian pada level mikro, khususnya pada pelaku UMKM di tingkat kelurahan masih relatif terbatas. Meskipun demikian, kelompok pelaku UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap timbulan sampah plastik harian dan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Sementara itu, belum ditemukan kajian yang secara spesifik mengevaluasi sejauh mana program pengendalian penggunaan plastik memengaruhi perilaku pelaku UMKM maupun interaksi mereka dengan fasilitas, mekanisme, dan dukungan program yang disediakan pemerintah daerah.

Dari sisi metodologis, belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan Model Evaluasi CIPP (Stufflebeam, 1966) dengan komponen *outcomes* dari

Model Evaluasi Program Bridgman dan Davis (2000, dalam Badjuri dan Yuwono, 2002:138-139) untuk menilai efektivitas program pengendalian penggunaan plastik secara simultan. Pendekatan sebelumnya cenderung menitikberatkan pada implementasi atau kepatuhan, sehingga belum mampu menangkap hubungan komprehensif antara *input*, proses, hasil, dan dampak program sebagai satu rangkaian evaluasi yang utuh.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tematik, kontekstual, dan metodologis dengan melakukan evaluasi hasil serta dampak Program Pengendalian Penggunaan Plastik berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019. Penelitian ini difokuskan pada pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, sebagai kelompok yang belum banyak disentuh dalam kajian sebelumnya. Penggunaan Model CIPP untuk menilai *input*, *process*, dan *product* program serta indikator *outcomes* dari Bridgman dan Davis untuk menilai dampak terhadap perilaku dan lingkungan memberikan kerangka evaluasi yang lebih menyeluruh, sistematis, dan berbasis bukti.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman akademik mengenai pengendalian sampah plastik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi perbaikan program dan meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan di tingkat lokal.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Administrasi Publik

Istilah administrasi publik terdiri dari dua kata, yakni administrasi dan publik. Administrasi berasal dari Bahasa Latin, yakni “*ad*” yang berarti intensif dan “*ministrare*” yang berarti melayani atau memenuhi, sehingga “*administrare*” dapat diartikan sebagai melayani atau memenuhi secara intensif (Mustari, 2022). Simon (dalam Hisamuddin dan Andriani, 2023) menyatakan bahwa administrasi dapat dikatakan sebagai kegiatan dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan Tead (1951, dalam Lendriyono, 2022) menyatakan administrasi meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat eksekutif dalam suatu organisasi untuk mengatur, memajukan, hingga melengkapi usaha kerja sama kelompok orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu.

Beberapa pakar ahli ilmu administrasi menggunakan istilah administrasi dalam arti sempit berdasarkan pendekatan teori dan pemahaman masyarakat umum, seperti Banga (2018) yang menjelaskan administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang bersifat ketatausahaan atau mencakup kegiatan surat-menyurat, pendistribusian, pengadaan, hingga pengelolaan data dan informasi dalam rangka penentuan pengambilan kebijakan dan keputusan organisasi.

Adapun administrasi dalam arti luas ditandai dengan lahirnya pemikiran ilmiah dalam karya yang berjudul “*shop management*” (Taylor, 1911) dan “*general and industrial management*” (Fayol, 1930). Robbins (1983)

mengemukakan administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain. Sementara itu, Chandler dan Plano (1988, dalam Kismartini dan Yusuf, 2023) berpendapat administrasi adalah proses pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya organisasi publik dalam rangka formulasi, implementasi, dan mengelola hasil kebijakan publik.

Selanjutnya, Banga (2018) menyimpulkan bahwa administrasi harus memperhatikan sejumlah komponen pokok yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Mutlak adanya kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- b. Mutlak adanya kesepakatan atau kesepahaman untuk bekerja sama.
- c. Kerja sama yang dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional, yaitu memastikan dapat memberikan keuntungan dan manfaat bersama, terukur atau terdapat kepastian tentang hak dan kewajiban dalam proses kerja sama, serta memiliki aturan atau prosedur yang telah disepakati dan ditaati bersama.
- d. Mutlak adanya tujuan bersama yang hendak dicapai.
- e. Mutlak adanya struktur dan fungsi sebagai penggerak pelaksanaan kerja sama.
- f. Dalam praktik kerjasama diperlukan ketersediaan sumber daya yang memadai.

Caiden (1982) menyatakan bahwa administrasi publik mencakup berbagai fungsi penting, seperti pengambilan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, serta menjalin kerja sama dengan DPR dan organisasi masyarakat

guna memperoleh dukungan publik dan pendanaan bagi program-program pemerintah. Selain itu, administrasi publik juga meliputi pembentukan dan penyesuaian struktur organisasi, pengelolaan serta pengawasan aparatur, kepemimpinan, komunikasi, hingga fungsi pengendalian, yang kesemuanya dijalankan oleh lembaga eksekutif maupun instansi pemerintahan lainnya.

Berdasarkan pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan gabungan antara ilmu dan seni yang dijalankan oleh sekelompok individu dalam suatu organisasi publik, yang bekerja secara rasional dan terorganisir guna mencapai tujuan bersama yang bersifat publik. Dalam pengertian yang lebih luas, administrasi publik dipahami sebagai suatu proses kerja sama yang melibatkan sejumlah orang dalam suatu organisasi pemerintahan, yaitu secara sistematis melakukan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang tersedia, dengan tujuan utama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Menurut Keban (2014, dalam Kismartini dan Yusuf, 2023), ruang lingkup administrasi publik terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Organisasi Publik, berkaitan dengan model organisasi, perilaku birokrasi, hingga bagaimana sebuah organisasi publik dirancang dan beroperasi.
- 2) Manajemen Publik, membahas tentang proses perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, hingga pengawasan dalam sektor publik.

- 3) Kebijakan Publik, mencakup proses perumusan, pelaksanaan program, serta evaluasi kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat..

1.6.2 Paradigma Administrasi Publik

Ilmu administrasi publik mengalami perkembangan yang terus berlangsung hingga era modern saat ini. Dalam kerangka pemikiran kontemporer, kemajuan administrasi publik dapat dianalisis melalui berbagai sudut pandang. Henry (dalam Rahman, 2024), mengemukakan bahwa terdapat enam paradigma utama yang menandai evolusi administrasi negara, yang masing-masing dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Paradigma Pertama dalam perkembangan administrasi publik, yang berlangsung antara tahun 1900 hingga 1926, dikenal sebagai Paradigma Dikotomi antara Politik dan Administrasi. Tokoh sentral dalam paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Dalam karyanya yang berjudul “*Politics and Administration*” (1900), Goodnow menyatakan bahwa politik seharusnya berfokus pada penetapan kebijakan atau perwujudan kehendak rakyat, sementara administrasi bertugas melaksanakan kebijakan tersebut. Pemisahan tersebut tercermin dalam pembagian fungsi antara lembaga legislatif yang mewakili aspirasi rakyat dan lembaga eksekutif yang melaksanakan kebijakan tersebut. Sementara itu, lembaga yudikatif berperan dalam mendukung proses perumusan tujuan dan kebijakan publik. Paradigma tersebut membawa implikasi bahwa administrasi publik diposisikan sebagai suatu proses yang netral secara nilai yang

bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam birokrasi pemerintahan.

Paradigma Kedua yang berkembang pada rentang waktu 1927 hingga 1937 dikenal dengan sebutan Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh penting dalam paradigma ini antara lain Willoughby, Gullick, dan Urwick, yang pemikirannya sangat dipengaruhi oleh aliran manajemen klasik, seperti yang dikembangkan oleh Henry Fayol dan Frederick Taylor. Dalam kerangka ini, administrasi publik dipandang melalui penerapan prinsip-prinsip manajerial yang dianggap bersifat universal. Salah satu kontribusi utamanya adalah konsep POSDCORB, yang terdiri dari *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (penyusunan staf), *Directing* (pengarahan), *Controlling* (pengendalian), *Reporting* (pelaporan), dan *Budgeting* (penganggaran). Para tokoh paradigma tersebut tidak secara tegas menyebutkan dimana administrasi publik seharusnya diterapkan (lokus) karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut berlaku secara umum di berbagai organisasi, termasuk di sektor pemerintahan. Dengan demikian, paradigma ini menempatkan penekanan utama pada aspek fokus (isi dan prinsip administrasi), bukan pada lokus (tempat atau konteks penerapannya).

Paradigma Ketiga, yang berlangsung sekitar tahun 1950 hingga 1970, menempatkan administrasi publik sebagai cabang dari ilmu politik. Morstein-Marx sebagai editor "*Elements of Public Administration*" (1946) mengkritik ide pemisahan teguh antara politik dan administrasi, serta menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak realistis. Sementara itu, Herbert Simon

menyoroti bahwa prinsip-prinsip administrasi klasik kerap bertentangan dan gagal berlaku secara universal. Kedua kritik tersebut melahirkan pandangan baru, yakni administrasi publik dipahami sebagai bagian integral dari ilmu politik, dengan birokrasi pemerintah sebagai arena utamanya. Namun, akibat banyaknya kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi, fokus teori kemudian menjadi kabur, dan para ahli belum berhasil merumuskan kerangka fokus yang benar-benar menggantikan prinsip lama tersebut.

Paradigma Keempat muncul antara tahun 1956 hingga 1970, memosisikan administrasi publik sebagai bagian dari Ilmu Administrasi. Dalam kerangka tersebut, perhatian utamanya tertuju pada studi perilaku organisasi, analisis manajerial, serta adopsi berbagai teknologi modern, mulai dari metode kuantitatif dan analisis sistem, hingga riset operasi. Ketika paradigma ini berkembang, terdapat dua cabang utama, yaitu pengembangan ilmu administrasi murni yang diperkaya oleh psikologi sosial dan penerapan pendekatan kebijakan publik. Kedua cabang tersebut dapat diaplikasikan, baik dalam konteks administrasi publik maupun dunia bisnis, sehingga paradigma ini tidak menetapkan batasan lokus yang jelas bagi penerapannya.

Paradigma Kelima muncul sekitar tahun 1970, menegaskan administrasi publik sebagai disiplin tersendiri atau Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, dengan ruang lingkup dan perhatian yang jelas. Pada paradigma ini, fokus kajian meliputi teori organisasi, teori manajemen, serta kebijakan publik. Adapun seluruh fokus kajian tersebut dapat diterapkan langsung pada isu maupun kepentingan yang bersifat publik.

Paradigma Keenam berlangsung sejak sekitar tahun 1990 hingga saat ini, dikenal sebagai paradigma *Governance*. Sebagai kelanjutan dari tradisi perkembangan administrasi publik, paradigma ini menempatkan tiga pilar utama, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sebagai pusat dinamika penyelenggaraan pemerintahan (Santosa, 2012). Berbeda dengan model sebelumnya yang menekankan peran “*government*” semata, paradigma *governance* menekankan kolaborasi lintas sektoral untuk menciptakan stabilitas, akuntabilitas, dan partisipasi. Transformasi dari orientasi “*government*” menuju “*governance*” tersebut kemudian diarahkan pada upaya mewujudkan praktik pemerintahan yang terbuka, responsif, dan memenuhi prinsip *good governance*.

Penelitian ini menggunakan paradigma keenam, yaitu *governance* yang menekankan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai *good governance*. Adapun fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kinerja pegawai lewat kebijakan yang melibatkan semua pihak, sehingga masyarakat sebagai pengguna merasa puas. Selain itu, paradigma keenam menekankan bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan layanan publik seoptimal mungkin melalui kebijakan-kebijakan yang dirancang agar masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintah.

1.6.3 Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian prinsip dan pedoman dasar yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan langkah-langkah penyelesaian suatu permasalahan. Sebagai fondasi dalam proses perencanaan,

kepemimpinan, dan pengambilan keputusan, kebijakan menjelaskan tujuan yang hendak dicapai beserta cara-cara pencapaiannya. Menurut Jones (dalam Winarno, 2016), kebijakan sering dianggap sama dengan rancangan besar, program, standar, tujuan, keputusan, atau usulan. Sementara itu, Friederich (dalam Winarno, 2016) menjelaskan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diajukan oleh pemerintah, kelompok, atau individu dalam situasi tertentu yang bisa menimbulkan tantangan maupun peluang. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan dapat dipahami sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu.

Istilah "publik" dalam kebijakan publik mengacu pada masyarakat secara umum. Artinya, kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai wakil rakyat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut Kismartini dan Yusuf (2023), kebijakan publik dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, aspirasi masyarakat disalurkan melalui individu atau kelompok yang mewakili mereka dalam sistem demokrasi. Namun, tidak semua orang memiliki pandangan atau kebutuhan yang sama karena setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda berdasarkan kepentingan pribadi, nilai-nilai etika, kebebasan, hak pribadi, dan keadilan dalam pembagian sumber daya.

Adapun Dye (dalam Suwitri, 2009) menjelaskan bahwa "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*". Artinya, kebijakan publik

mencakup segala hal yang diputuskan pemerintah untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Anderson (dalam Suwitri, 2009) menambahkan bahwa kebijakan publik meliputi kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintahan, yang kemudian diikuti oleh pelaku-pelaku kebijakan untuk memecahkan persoalan masyarakat.

Menurut Sore (2017), kebijakan publik bersifat luas dan strategis, sehingga berfungsi sebagai pedoman umum bagi keputusan-keputusan khusus di tingkat di bawahnya. Sementara itu, Aminullah (dalam Sari *et al.*, 2026) menegaskan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dirancang untuk memengaruhi sistem dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Gerston (dalam Kertati *et al.*, 2023) juga menekankan bahwa kebijakan publik merupakan setiap tindakan pemerintah pada berbagai tingkatan yang bertujuan memecahkan masalah publik dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.

Anderson dan Dye (dalam Kismartini, 2019) menjelaskan alasan mengapa analisis kebijakan publik penting untuk dilakukan, yakni untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bagaimana pola dan proses analisis kebijakan publik, untuk membantu *policy maker* dalam memecahkan masalah publik dalam kehidupan sehari-hari, dan menghindari kegagalan dalam implementasi kebijakan.

Menurut Anderson (1970, dalam Winarno, 2016) dalam bukunya “*Public Policymaking*”, siklus kebijakan publik meliputi lima tahapan utama, antara lain:

- a. Identifikasi isu kebijakan publik yang perlu diselesaikan.
- b. Perumusan proposal alternatif kebijakan dan strategi implementasi.

- c. Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- d. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana dan mekanisme yang telah ditetapkan.
- e. Evaluasi atau menilai efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap pemecahan masalah.

Sementara itu, William N. Dunn (dalam Winarno, 2016) mengidentifikasi beberapa tahapan kebijakan publik, meliputi penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), dengan detail sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Seluruh masalah yang akan disertakan ke dalam agenda publik oleh pejabat harus dipertimbangkan apakah pantas dan sesuai menjadi bagian dari agenda kebijakan. Hal tersebut terjadi karena tidak semua isu dapat diselesaikan, sehingga pembuat kebijakan harus menyusun prioritas.

2) Formulasi Kebijakan

Persoalan publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan selanjutnya dianalisis dan dirumuskan solusinya oleh para pembuat kebijakan. Solusi yang ditawarkan tersebut berupa pilihan atau alternatif kebijakan. Selain itu, pembuat kebijakan juga harus memilih

alternatif yang dianggap paling sesuai dan mampu menyelesaikan masalah.

3) Adopsi Kebijakan

Salah satu dari berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh perumus kebijakan selanjutnya dipilih untuk dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota parlemen, tercapainya kesepakatan antarpimpinan lembaga, maupun melalui putusan pengadilan.

4) Implementasi Kebijakan

Lembaga-lembaga administrasi dan instansi pemerintah di tingkat operasional menjalankan keputusan kebijakan yang telah dipilih sebagai solusi atas suatu permasalahan. Maka dari itu, unit-unit yang bertugas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus mengerahkan sumber daya manusia maupun finansial yang dibutuhkan untuk mendukung implementasinya.

5) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan atau alternatif yang telah dipilih dan dijalankan berhasil menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ukuran atau kriteria tertentu untuk menilai tingkat keberhasilan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, kebijakan publik bukan sekadar pernyataan niat atau aspirasi pemerintah, melainkan serangkaian keputusan dan tindakan, termasuk

keputusan untuk tidak bertindak yang memiliki konsekuensi nyata bagi masyarakat.

1.6.4 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi hanya dapat dilakukan apabila kebijakan tersebut sudah mulai dijalankan, meskipun tidak terdapat ketentuan yang pasti mengenai kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi (Subarsono, 2005). Menurut Jones (dalam Winarno, 2016), evaluasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar manfaat dari suatu kebijakan. Sementara itu, Anderson (1970, dalam Winarno, 2016) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan mencakup penilaian terhadap isi kebijakan, pelaksanaannya, dan dampaknya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penting yang bersifat menyeluruh dan tidak hanya dilakukan di akhir, melainkan pada setiap tahap proses kebijakan.

Menurut Wirawan (2012), evaluasi merupakan alat yang berasal dari berbagai bidang ilmu yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memberikan penilaian terhadap fenomena yang berkaitan dengan penerapan ilmu dalam praktik profesional. Sementara itu, Ambiyar dan Muharika (2019) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang fungsi atau kinerja suatu hal, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat.

Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu objek telah mencapai hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Wirawan (2012) menyebutkan beberapa tujuan evaluasi, di antaranya:

- a. Mengetahui dampak kebijakan terhadap masyarakat;
- b. Memeriksa apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana;
- c. Menilai kualitas program berdasarkan standar tertentu;
- d. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan kebijakan;
- e. Menentukan langkah-langkah yang perlu diambil;
- f. Memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan yang dijalankan;
- g. Memberikan masukan bagi pimpinan dan pelaksana kebijakan; dan
- h. Mengembangkan pendekatan dan metode evaluasi yang lebih baik.

Bersumber pada pendapat para ahli tersebut, maka evaluasi dapat dipahami sebagai proses yang sistematis untuk menilai kondisi suatu objek dengan menggunakan instrumen yang sesuai berdasarkan indikator, tujuan, dan manfaat dari objek yang dievaluasi, serta dapat berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait objek evaluasi tersebut. Selain itu, evaluasi merupakan metode untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program. Maka dari itu, Suwitri (2009) menyatakan bahwa evaluasi digunakan untuk menunjukkan fase pengelolaan program yang mencakup:

1) Evaluasi Tahap Perencanaan (*Ex-Ante*)

Dalam tahap perencanaan, evaluasi berperan dalam mengidentifikasi serta menetapkan prioritas dari berbagai alternatif strategi yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2) Evaluasi Tahap Pelaksanaan (*On-Going*)

Pada tahap pelaksanaan, evaluasi berfungsi untuk menilai tingkat kemajuan program dengan membandingkan hasil pelaksanaannya terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Evaluasi Tahap Pasca Pelaksanaan (*Ex-Post*)

Evaluasi pasca pelaksanaan bertujuan untuk menilai keberhasilan akhir program setelah selesai dilaksanakan, dengan melihat sejauh mana hasil dan dampak yang dicapai mampu menyelesaikan masalah yang dituju, serta menilai relevansi, efektivitas, kemanfaatan, dan keberlanjutan program.

Adapun program dalam kebijakan publik merupakan suatu rencana kegiatan yang lebih logis, sistematis, dan terencana. Program memiliki sifat yang dinamis, artinya pelaksanaan program akan selalu berubah dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, evaluasi program sangat dibutuhkan untuk mengetahui kelayakan maupun relevansi suatu program terhadap persoalan yang sedang terjadi di kalangan masyarakat.

Menurut Arifin (dalam Pramida *et al.*, 2024), evaluasi program merupakan suatu proses atau kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkelanjutan dan

menyeluruh sebagai upaya pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu (nilai dan arti) suatu program, berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu untuk membuat suatu keputusan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan program.

Menurut Daniel L. Stufflebeam (1966, dalam Musringudin *et al.*, 2022), evaluasi adalah suatu proses untuk menggambarkan, mencari, dan menyampaikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam menentukan berbagai alternatif keputusan. Stufflebeam (1966, dalam Musringudin *et al.*, 2022) menyatakan terdapat empat model untuk mengevaluasi program yang masing-masing diperuntukkan bagi setiap keputusan, yaitu: a) *context evaluation as a means of servicing planning decisions*; b) *input evaluation these structuring decision*; c) *process evaluation to guide implementing*; dan d) *product evaluation to serve recycling decisions*. Model evaluasi program tersebut kemudian disebut dengan Model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) dengan rincian sebagai berikut:

1) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Tujuan utama dari evaluasi konteks adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan suatu objek, seperti lembaga, program, kelompok sasaran, maupun individu, serta memberikan arahan yang tepat guna melakukan perbaikan atau penyempurnaan. Evaluasi konteks juga bertujuan untuk menggambarkan dan merinci kondisi lingkungan tempat program dijalankan, termasuk latar belakang yang memengaruhi perumusan tujuan dan strategi program, aspek legalitas,

dukungan dari lingkungan sekitar, karakteristik populasi sasaran, serta tujuan yang ingin dicapai oleh program tersebut.

2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Orientasi utama dari evaluasi *input* adalah memberikan panduan dalam merancang program yang dapat membawa perubahan sesuai dengan kebutuhan yang tersedia. Evaluasi *input* berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang menunjang pencapaian tujuan program. Komponen dalam evaluasi *input* meliputi indikator sumber daya manusia (sasaran program, pendamping, dan pengelola program), materi pelatihan, jenis kegiatan yang dilakukan, ketersediaan sarana dan prasarana, anggaran atau pendanaan, serta prosedur atau aturan yang mendukung jalannya program.

3) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Selanjutnya, evaluasi proses dapat meninjau rencana program serta hasil evaluasi sebelumnya untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari program yang perlu dipantau. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa evaluasi proses bertujuan memberikan informasi mengenai pelaksanaan program di lapangan, termasuk memantau apakah prosedur dan strategi yang diterapkan sudah berjalan sesuai rencana, apakah pelaksanaannya selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, serta apakah program tersebut telah mempertimbangkan karakteristik dari kelompok sasaran. Adapun komponen evaluasi proses tersebut mencakup kegiatan persiapan, proses pemberdayaan, pembinaan

usaha, kemitraan, pengawasan pelaksanaan program, serta hambatan maupun dukungan yang muncul selama pelaksanaan.

4) Evaluasi Hasil (*Product Evaluation*)

Tujuan dari evaluasi produk atau hasil adalah untuk mengukur, menganalisis, dan menilai sejauh mana hasil atau pencapaian program telah terealisasi. Evaluasi tersebut memberikan informasi penting mengenai tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi produk atau hasil juga membantu menentukan apakah strategi, prosedur, atau metode yang telah diterapkan perlu dihentikan, disesuaikan, atau dilanjutkan dalam bentuk yang sama. Komponen dalam evaluasi produk mencakup indikator keberhasilan tujuan, dampak program terhadap penerima manfaat atau sasaran, masyarakat, serta pihak penyelenggara program.

Namun, model tersebut belum secara spesifik menekankan pada analisis dampak program terhadap kelompok sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan Model Evaluasi Program yang dikembangkan oleh Bridgman dan Davis (2000, dalam Badjuri dan Yuwono, 2002:138-139) sebagai pelengkap, khususnya pada tahap *evaluation* dalam siklus kebijakan publik, guna menilai dampak (*policy impact*) dari pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik terhadap pelaku usaha UMKM.

Menurut Bridgman dan Davis (2000, dalam Badjuri dan Yuwono, 2002:138-139), pengukuran evaluasi program secara umum mengacu pada empat indikator pokok, yakni:

1) *Input*

Indikator ini menekankan pada penentuan apakah kebutuhan dasar untuk menjalankan program telah terpenuhi, di antaranya adalah ketersediaan tenaga pelaksana (SDM), alokasi dana, dan sarana prasarana lainnya.

2) *Process*

Fokus dari indikator ini adalah menilai cara kerja program, yaitu bagaimana program diubah menjadi pelayanan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Indikator utamanya adalah mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dari metode atau strategi yang dipakai untuk merealisasikan program tersebut.

3) *Outputs*

Indikator hasil (*outputs*) digunakan untuk menilai produk atau keluaran nyata yang dihasilkan oleh suatu sistem atau proses kebijakan publik, termasuk mengukur tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

4) *Outcomes*

Penilaian dampak (*outcomes*) diarahkan untuk mengevaluasi pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat luas atau kelompok yang dipengaruhi oleh kebijakan. Indikator tersebut mencakup analisis terhadap konsekuensi atau akibat yang timbul dari implementasi program.

Tabel 1.4 Diskursus Teori Evaluasi Program

Komponen	Model CIPP Stufflebeam (1966)	Model Bridgman & Davis (2000)	Relevansi terhadap Penelitian	Komponen Akhir Penelitian
<i>Context</i>	Menilai kebutuhan, masalah, dan kondisi awal yang melatarbelakangi program.	—	Tidak digunakan. <i>Context</i> pada dasarnya menilai kebutuhan dan rasionalitas kebijakan, namun aspek tersebut telah ditetapkan secara normatif melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 sehingga berada di luar lingkup evaluasi ini. Penelitian ini memusatkan perhatian pada evaluasi hasil program, sehingga penilaian terhadap proses perumusan kebijakan tidak relevan dengan tujuan evaluasi.	1) <i>Input</i> 2) <i>Process</i> 3) <i>Product</i> 4) <i>Outcomes</i>
<i>Input</i>	Menilai sumber daya, strategi, sarana-prasarana, dan dukungan yang menjadi prasyarat pelaksanaan program.	Instrumen, kapasitas kelembagaan, dan dukungan pelaksanaan.	Digunakan. <i>Input</i> dalam CIPP digunakan karena relevan untuk menilai kesiapan pelaksanaan program, khususnya terkait ketersediaan sumber daya dan sarana-prasarana. Sementara itu, <i>input</i> dalam Bridgman & Davis tidak diadopsi karena memiliki tumpang tindih konseptual (redundansi analitis) dan tidak memberikan nilai analitis tambahan bagi evaluasi hasil yang dilakukan.	
<i>Process</i>	Menilai pelaksanaan program,	Menggambarkan pelaksanaan kebijakan oleh	Digunakan. <i>Process</i> CIPP digunakan karena sesuai untuk menilai pelaksanaan program pada level operasional pelaku UMKM. <i>Process</i> dalam	

	mekanisme kerja, partisipasi, serta konsistensi implementasi.	aktor pelaksana.	Bridgman & Davis tidak diadopsi karena berorientasi pada proses administratif kebijakan dan tidak memberikan kontribusi analitis tambahan bagi evaluasi hasil program.
<i>Product/ Output</i>	Menilai hasil langsung program, yakni perubahan perilaku, capaian kegiatan, <i>output</i> nyata.	Hasil administratif atau keluaran formal kebijakan.	Digunakan. <i>Product</i> CIPP digunakan karena menilai hasil langsung berupa perubahan perilaku dan praktik UMKM. Sementara itu, <i>outputs</i> dalam Bridgman & Davis bersifat administratif sehingga kurang relevan untuk mengevaluasi hasil program pada tingkat pelaku usaha.
<i>Outcomes</i>	—	Dampak jangka menengah hingga panjang dari implementasi kebijakan terhadap perilaku, lingkungan, atau sistem sosial.	Digunakan. <i>Outcomes</i> Bridgman & Davis digunakan untuk menilai dampak jangka menengah-panjang yang tidak tercakup dalam <i>product</i> CIPP. Dimensi ini diperlukan untuk mengevaluasi pengaruh program terhadap perubahan perilaku dan kondisi lingkungan secara berkelanjutan.

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Pemilihan komponen evaluasi dalam penelitian ini didasarkan pada Tabel 1.4 mengenai analisis diskursus teori terhadap dua model evaluasi program, yaitu Model CIPP oleh Stufflebeam (1966, dalam Musringudin *et al.*, 2022) dan Model Evaluasi Program Bridgman & Davis (2000, dalam Badjuri dan Yuwono, 2002:138-139). Model CIPP dipilih karena menyediakan kerangka evaluatif yang sistematis untuk menilai kesiapan program (*input*), proses pelaksanaan (*process*), serta hasil langsung yang dihasilkan dari implementasi program (*product*). Ketiga komponen tersebut selaras dengan fokus penelitian yang berada pada ranah evaluasi hasil, bukan pada tahap perumusan atau penetapan agenda kebijakan. Dengan demikian, *context* tidak digunakan karena kebutuhan, dasar, dan rasionalitas program telah ditetapkan secara normatif melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 sehingga berada di luar lingkup evaluasi dalam penelitian ini.

Model Evaluasi Program Bridgman & Davis digunakan sebagai pelengkap terhadap Model Evaluasi Program CIPP, khususnya melalui *outcomes* yang menilai dampak jangka menengah dan panjang dari pelaksanaan program. Model Evaluasi Program CIPP tidak menyediakan dimensi analisis terhadap dampak berkelanjutan, sehingga *outcomes* diperlukan untuk menelaah perubahan perilaku pelaku UMKM serta implikasi terhadap kondisi lingkungan setelah program berjalan. Adapun *input*, *process*, dan *outputs* dalam model Bridgman & Davis tidak diadopsi karena secara konseptual telah terakomodasi dalam kerangka CIPP. Pemilihan tersebut dilakukan untuk menghindari redundansi konsep (*conceptual redundancy*) serta menjaga konsistensi kerangka evaluasi. Dengan demikian,

penelitian ini menggunakan model evaluasi program gabungan dengan komponen sebagai berikut:

1) *Input*

Input digunakan untuk melihat kesiapan awal suatu program sebelum dilaksanakan secara penuh. Dalam konteks evaluasi program pengendalian penggunaan plastik, *input* berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang menjadi penopang utama pelaksanaan program, baik berupa sarana dan prasarana, dukungan pendanaan, maupun kapasitas kelembagaan. Penilaian terhadap *input* penting untuk memastikan bahwa program memiliki fondasi yang memadai sehingga dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

2) *Process*

Process berfokus pada bagaimana program dijalankan dalam praktik. Evaluasi pada tahap ini diarahkan untuk menelaah mekanisme pelaksanaan program, termasuk pola sosialisasi, bentuk pendampingan, serta koordinasi antarpihak yang terlibat. Dengan menilai aspek proses, penelitian ini berupaya memahami sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana dan mampu menjangkau sasaran yang ditetapkan.

3) *Product*

Product digunakan untuk menilai hasil langsung yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan program. Hasil tersebut mencerminkan capaian jangka pendek yang dapat diamati setelah program berjalan,

seperti perubahan pada praktik atau perilaku sasaran program. Penilaian terhadap *product* memberikan gambaran awal mengenai efektivitas program dalam menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4) *Outcomes*

Outcomes melengkapi evaluasi dengan menilai dampak yang bersifat lebih lanjut. Fokusnya tidak hanya pada hasil yang segera terlihat, tetapi juga pada perubahan jangka menengah dan panjang yang ditimbulkan oleh program. Melalui penilaian *outcomes*, penelitian ini berupaya melihat keberlanjutan hasil program serta implikasinya terhadap perubahan perilaku dan kondisi lingkungan secara lebih luas.

1.6.5 Program Pengendalian Penggunaan Plastik

Pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstranas). Kebijakan tersebut menetapkan target pengurangan timbulan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025, dengan pengendalian penggunaan plastik sekali pakai sebagai salah satu fokus strategis dalam pengelolaan sampah nasional.

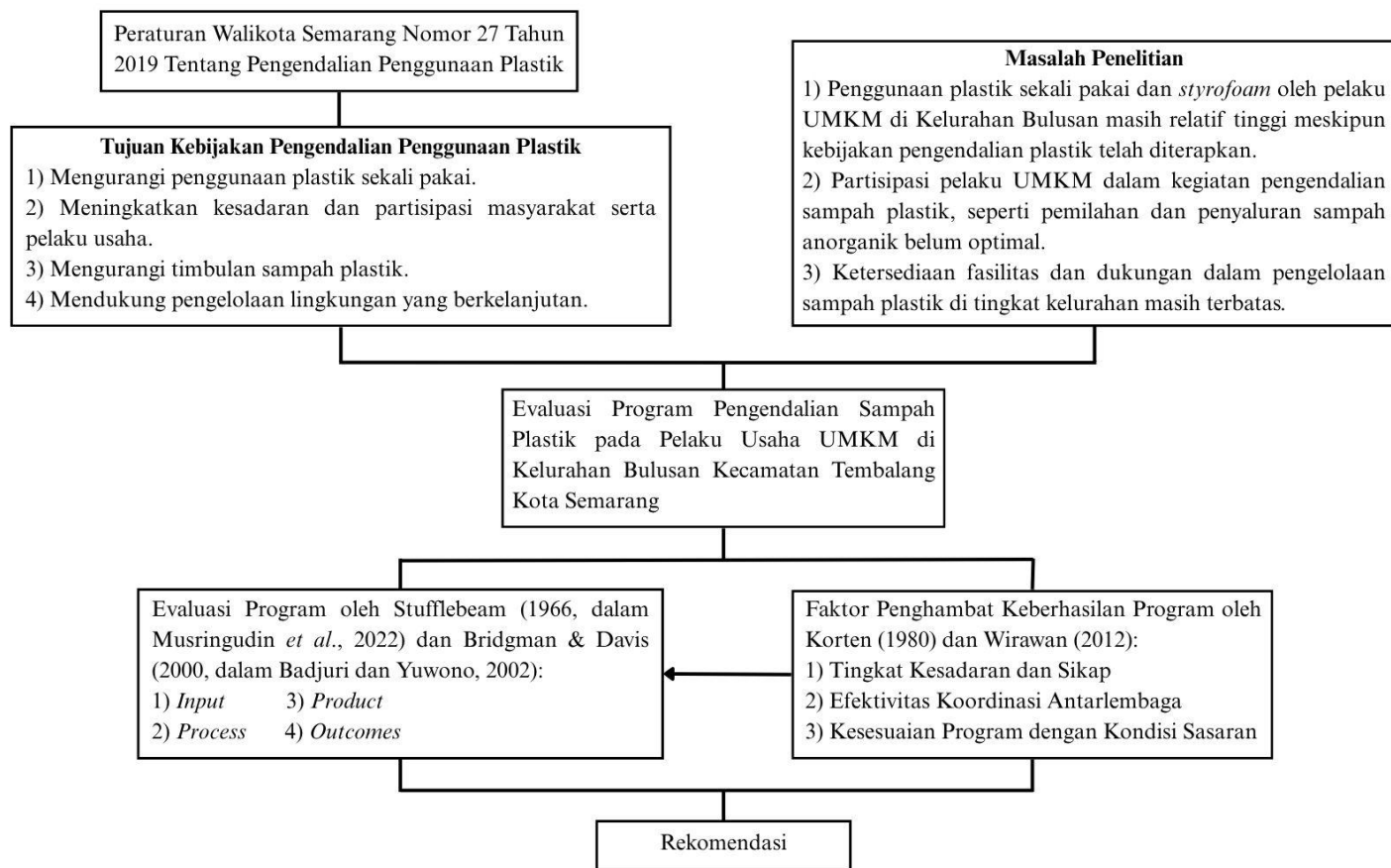
Pada tingkat daerah, arah kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui berbagai peraturan kepala daerah yang mengatur pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sekaligus mendorong penerapan prinsip pengelolaan sampah yang

berkelanjutan, seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, Kota Semarang, Kota Balikpapan, dan Kota Bogor.

Demikian pula Pemerintah Kota Semarang, kebijakan pengendalian penggunaan plastik diatur melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan tersebut bertujuan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, *styrofoam*, dan sedotan plastik melalui keterlibatan masyarakat maupun pelaku usaha. Dalam implementasinya, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, antara lain melalui kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha, edukasi pemilahan sampah dari sumber, penguatan bank sampah, *monitoring* pelaksanaan kebijakan, serta berbagai kampanye perubahan perilaku masyarakat menuju pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Program pengendalian penggunaan plastik tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga pelaku usaha. Melalui berbagai bentuk implementasi tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan plastik sekali pakai. Adapun sasaran dari program pengendalian penggunaan plastik tersebut merupakan masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan plastik sekali pakai, *styrofoam*, dan sedotan plastik dalam kegiatan operasionalnya, sehingga masyarakat didorong untuk beralih menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.8 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

1.8 Operasionalisasi Konsep

Evaluasi program merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengetahui keefektifan program, hambatan pelaksanaan, kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, serta dampak yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, evaluasi difokuskan pada Program Pengendalian Penggunaan Plastik yang dijalankan Pemerintah Kota Semarang melalui kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 pada pelaku usaha UMKM di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang.

Evaluasi hasil tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana Program Pengendalian Penggunaan Plastik mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk menjawab tujuan dari penelitian mengenai keberhasilan program pengendalian penggunaan plastik pada pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Program Pengendalian Penggunaan Plastik pada Pelaku Usaha UMKM di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang

a. Input

Pada tahap *input*, penelitian ini memfokuskan perhatian pada kesiapan sumber daya yang mendukung pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Fenomena *input* dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat sejauh mana ketersediaan dan dukungan sumber daya tersebut mampu menunjang implementasi program

dalam mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai pada pelaku usaha UMKM, khususnya di Kelurahan Bulusan.

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya dipahami secara material, tetapi juga mencakup dukungan kelembagaan dan instrumen pendukung program. Oleh karena itu, gejala *input* yang dianalisis meliputi:

- 1) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan, seperti fasilitas pengolahan sampah, wadah pengumpulan sampah plastik, serta keberadaan dan akses terhadap bank sampah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM Kelurahan Bulusan.
- 2) Ketersediaan dan Dukungan Anggaran Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan, yang mencakup alokasi pendanaan dari pemerintah daerah maupun sumber pendukung lainnya untuk kegiatan sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta operasional program.
- 3) Dukungan Kelembagaan dan Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Program Pengendalian Penggunaan Plastik pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, khususnya peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam menyediakan kebijakan teknis, arahan pelaksanaan, serta fasilitasi program kepada pihak aparaturnya kelurahan dan pelaku UMKM.

- 4) Ketersediaan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaksana dalam Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan, baik pada tingkat dinas maupun kelurahan, yang ditugaskan untuk mengawal operasional pengendalian sampah plastik di lapangan..

b. *Process*

Pada tahap *process*, penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan dijalankan dalam praktiknya. Fenomena *process* pada penelitian ini diarahkan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan kebijakan pengendalian penggunaan plastik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dengan pelaksanaan program di Kelurahan Bulusan, khususnya yang melibatkan pelaku usaha UMKM.

Fokus evaluasi pada *process* tidak hanya melihat keberadaan kegiatan program, tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut dijalankan, disosialisasikan, serta sejauh mana pelaku usaha dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sampah plastik. Adapun gejala yang dianalisis pada tahap ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pilah Sampah oleh Pelaksana Program Pengendalian Penggunaan Plastik pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, sebagai bagian dari penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam rutinitas operasional usaha pelaku UMKM.
- 2) Pelibatan Pelaku UMKM dalam Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan, yakni upaya aktor pelaksana dalam

mendorong partisipasi pelaku UMKM melalui ajakan, pendampingan, dan fasilitasi dalam kegiatan pengendalian sampah plastik dan optimalisasi bank sampah.

- 3) Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Program Pengendalian Penggunaan Plastik pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, yang mencakup bentuk, frekuensi, serta luas jangkauan penyampaian informasi mengenai program pengendalian penggunaan plastik.
- 4) Koordinasi dan Pengawasan Antarpelaksana Program Pengendalian Penggunaan Plastik pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, yang mencakup sinergi komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, aparatur kelurahan, pengelola bank sampah, serta pihak terkait lainnya dalam mengawal implementasi program pengendalian penggunaan plastik di lapangan.

c. Product

Pada tahap *product*, penelitian ini menilai hasil langsung yang muncul dari pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan. Fenomena *product* pada penelitian ini diarahkan untuk melihat sejauh mana Program Pengendalian Penggunaan Plastik menghasilkan perubahan awal yang sesuai dengan tujuan pengendalian penggunaan plastik sekali pakai, khususnya pada pelaku usaha UMKM di Kelurahan Bulusan. Fokus evaluasi *product* terletak pada hasil nyata yang dapat diamati setelah program dijalankan, baik dalam bentuk perubahan perilaku maupun

penerapan praktik ramah lingkungan dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Adapun gejala yang dianalisis pada tahap *product* meliputi:

- 1) Perubahan Perilaku Pelaku UMKM dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Kelurahan Bulusan, yang mencakup upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan *styrofoam*, konsistensi dalam pemilahan sampah, serta meningkatnya kesadaran lingkungan dalam aktivitas operasional usaha.
- 2) Penerapan Kemasan Ramah Lingkungan oleh Pelaku UMKM dalam Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan, berupa penggunaan material alternatif non-plastik atau ramah lingkungan sebagai bentuk adaptasi terhadap program pengendalian penggunaan plastik.
- 3) Pemanfaatan Fasilitas Bank Sampah dan Keberlanjutan Perilaku Pelaku UMKM dalam Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan, seperti keterlibatan dalam kegiatan pemilahan serta penyaluran sampah plastik melalui bank sampah sebagai implikasi dari pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik.

d. *Outcomes*

Pada tahap *outcomes*, penelitian ini memfokuskan perhatian pada dampak lanjutan dari pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Fenomena *outcomes* dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat sejauh mana hasil

langsung yang dihasilkan program berkembang menjadi perubahan yang lebih berkelanjutan, baik bagi pelaku usaha UMKM maupun lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, *outcomes* dipahami sebagai konsekuensi jangka menengah dari pelaksanaan program yang mencerminkan keberlanjutan perubahan perilaku dan praktik pengelolaan sampah plastik. Adapun gejala yang dianalisis pada tahap *outcomes* meliputi:

- 1) Penurunan Timbulan Sampah Plastik dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan, sebagai dampak dari perubahan praktik pengelolaan sampah plastik sekali pakai oleh pelaku UMKM.
- 2) Peningkatan Kesadaran Kolektif dan Kebersihan Lingkungan UMKM melalui Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan, yang tercermin dari tumbuhnya kepedulian bersama antara masyarakat dan pelaku UMKM terhadap urgensi pengendalian sampah plastik.

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Program Pengendalian Penggunaan Plastik pada Pelaku Usaha UMKM di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Keberhasilan pelaksanaan suatu program sering kali tertahan oleh berbagai tantangan yang bersifat destruktif di tingkat lapangan. Sebagai sebuah intervensi, program dapat mengalami distorsi dan gagal mencapai hasil yang optimal apabila dihadapkan dengan faktor penghambat yang signifikan. Faktor penghambat merupakan kondisi atau rintangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan

program sehingga hasil yang dicapai tidak optimal. Dunn (2003) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya ditujukan untuk menilai hasil atau capaian kebijakan, tetapi juga untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan atau program. Faktor tersebut umumnya berkaitan dengan kelompok sasaran yang tidak terlibat dalam implementasi program, sumber daya manusia yang kapasitasnya rendah, tidak adanya koordinasi dan *monitoring*, serta program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Makinde dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2015).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Wirawan (2012) dalam “Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi” menyatakan bahwa keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, tingkat partisipasi pihak sasaran, serta kesesuaian sarana atau metode yang digunakan. Lebih lanjut, Wirawan menekankan bahwa tingkat kesadaran, komitmen, dan kemauan aktor yang terlibat untuk berpartisipasi turut menentukan efektivitas pelaksanaan program.

Sementara itu, Korten (1980, dalam Nandini *et al.*, 2022) menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, kemampuan organisasi pelaksana, serta kecocokan antara kapasitas organisasi pelaksana dan kebutuhan kelompok pemanfaat. Ketidaksesuaian di antara unsur-unsur tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan. Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, aspek-aspek yang diteliti untuk mengidentifikasi

faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik Pengendalian Sampah Plastik pada pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan diuraikan sebagai berikut:

a. Tingkat Kesadaran dan Sikap

Fenomena kesadaran dan sikap pada pelaku UMKM menjadi salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan. Fenomena kesadaran dan sikap di dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menilai aktivitas program secara langsung, melainkan untuk memahami kondisi subjektif pelaku UMKM yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam pengelolaan sampah plastik. Adapun gejala yang diamati dalam fenomena kesadaran dan sikap meliputi:

- 1) Pemahaman Pelaku UMKM Kelurahan Bulusan terhadap Tujuan dan Manfaat Program Pengendalian Penggunaan Plastik, yaitu sejauh mana pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan mengetahui serta memaknai program sebagai upaya pengendalian sampah plastik.
- 2) Sikap dan Persepsi Pelaku UMKM Kelurahan Bulusan terhadap Urgensi Pengurangan Sampah Plastik, yang mencakup pandangan pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan mengenai pentingnya pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dalam kegiatan usaha.
- 3) Tingkat Keterlibatan Aktif Pelaku UMKM Kelurahan Bulusan untuk Terlibat dalam Program Pengendalian Penggunaan Plastik, yang tercermin dari kesiapan, inisiatif, dan konsistensi pelaku UMKM di

Kelurahan Bulusan dalam mendukung upaya pengendalian sampah plastik.

b. Efektivitas Koordinasi Antarlembaga

Pada fenomena koordinasi antarlembaga, penelitian ini memfokuskan perhatian pada hubungan dan keterkaitan peran antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan. Fenomena koordinasi dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat sejauh mana keterhubungan antarlembaga memengaruhi jalannya program dan keterlibatan pelaku UMKM di tingkat kelurahan. Koordinasi dipahami sebagai pola hubungan kerja dan alur komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, aparatur Kelurahan Bulusan, pengelola Bank Sampah Tulip, dan pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan. Adapun gejala yang dianalisis pada fenomena koordinasi antarlembaga meliputi:

- 1) Kejelasan Alur Komunikasi dan Distribusi Informasi Antaraktor Pelaksana Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan, yaitu bagaimana informasi terkait program disampaikan dan diteruskan dari tingkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang hingga ke Kelurahan Bulusan dan pengelola Bank Sampah Tulip.
- 2) Keselarasan dan Sinergi Peran Antarlembaga Pelaksana Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan, yang mencerminkan sejauh mana peran masing-masing aktor saling melengkapi atau justru berjalan sendiri-sendiri dalam mendukung pelaksanaan program pada pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan.

- 3) Keberlanjutan Interaksi dan Tindak Lanjut Antarlembaga Pelaksana Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan, yaitu ada atau tidaknya aktivitas *monitoring*, pendampingan, atau komunikasi berkelanjutan antarpelaksana dalam mendukung pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik di Kelurahan Bulusan.

c. Kesesuaian Program dengan Kondisi Sasaran

Pada fenomena kesesuaian program, penelitian ini memfokuskan perhatian pada sejauh mana Program Pengendalian Penggunaan Plastik relevan dan selaras dengan kondisi, kebutuhan, serta karakteristik pelaku usaha UMKM di Kelurahan Bulusan. Fenomena ini diarahkan untuk melihat apakah program yang dirancang dapat diterima dan diterapkan oleh pelaku UMKM dalam praktik usaha sehari-hari. Kesesuaian program dalam penelitian ini dipahami sebagai kecocokan antara tujuan dan pendekatan program dengan realitas yang dihadapi pelaku UMKM. Adapun gejala yang dianalisis dalam fenomena ini meliputi:

- 1) Relevansi Tujuan Program Pengendalian Penggunaan Plastik dengan Kebutuhan Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, yaitu sejauh mana upaya pengendalian sampah plastik dipandang relevan dan bermanfaat bagi aktivitas usaha pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan.
- 2) Kesesuaian Pendekatan Program Pengendalian Penggunaan Plastik dengan Praktik Operasional Usaha Pelaku UMKM di Kelurahan

Bulusan, khususnya terkait penggunaan kemasan plastik dan styrofoam, serta praktik pengelolaan sampah di tempat usaha.

- 3) Tingkat Kemudahan Adaptasi Pelaku UMKM Kelurahan Bulusan terhadap Ketentuan Program Pengendalian Penggunaan Plastik, yang mencakup persepsi pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan terhadap tingkat kesulitan atau kemudahan dalam menerapkan program dalam kondisi nyata usaha.

Tabel 1.5 Operasionalisasi Konsep

Fokus	Fenomena	Gejala
Evaluasi Program Pengendalian Sampah Plastik pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang	<i>Input</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Program di Kelurahan Bulusan. 2) Ketersediaan dan Dukungan Anggaran Program di Kelurahan Bulusan. 3) Dukungan Kelembagaan dan Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Program pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan. 4) Ketersediaan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaksana dalam Program di Kelurahan Bulusan.
	<i>Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pilah Sampah oleh Pelaksana Program pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan. 2) Pelibatan Pelaku UMKM dalam Program di Kelurahan Bulusan. 3) Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Program pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan. 4) Koordinasi dan Pengawasan Antarpelaksana Program pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan.
	<i>Product</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perubahan Perilaku Pelaku UMKM dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Kelurahan Bulusan. 2) Penerapan Kemasan Ramah Lingkungan oleh Pelaku UMKM dalam Program di Kelurahan Bulusan. 3) Pemanfaatan Fasilitas Pengelolaan Sampah oleh Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan.
	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penurunan Timbulan Sampah Plastik dalam Pelaksanaan Program di Lingkungan UMKM dan Sekitar Kelurahan Bulusan. 2) Peningkatan Kesadaran Kolektif dan Kebersihan Lingkungan UMKM melalui Program di Kelurahan Bulusan.
Faktor Penghambat Keberhasilan	Tingkat Kesadaran dan Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemahaman Pelaku UMKM Kelurahan Bulusan terhadap Tujuan dan Manfaat Program. 2) Sikap dan Persepsi Pelaku UMKM Kelurahan Bulusan terhadap Urgensi Pengurangan Sampah Plastik. 3) Tingkat Keterlibatan Aktif Pelaku UMKM Kelurahan Bulusan untuk Terlibat dalam Program.

Program Pengendalian Sampah Plastik pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Efektivitas Koordinasi Antarlembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kejelasan Alur Komunikasi dan Distribusi Informasi Antaraktor Pelaksana Program di Kelurahan Bulusan. 2) Keselarasan dan Sinergi Peran Antarlembaga Pelaksana Program di Kelurahan Bulusan. 3) Keberlanjutan Interaksi dan Tindak Lanjut Antarlembaga Pelaksana Program di Kelurahan Bulusan.
	Kesesuaian Program dengan Kondisi Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Relevansi Tujuan Program dengan Kebutuhan Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan. 2) Kesesuaian Pendekatan Program dengan Praktik Operasional Usaha Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan. 3) Tingkat Kemudahan Adaptasi Pelaku UMKM Kelurahan Bulusan terhadap Ketentuan Program.

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

1.9 Argumen Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi, mengingat permasalahan sampah plastik masih menjadi isu lingkungan yang krusial di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Semarang. Meskipun Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, akan tetapi implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penyumbang utama penggunaan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dalam aktivitas operasionalnya.

Menurut Widianingsih dan Suhendra (2021), efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana aktor pelaksana dan kelompok sasaran mampu memahami, menginternalisasi, dan menerapkan isi kebijakan dalam praktik sehari-hari. Dalam mencapai kelompok sasaran, hal tersebut seringkali terhambat oleh keterbatasan informasi, minimnya pendampingan teknis, serta rendahnya kapasitas kelembagaan dalam mengadaptasi regulasi lingkungan. Pendapat tersebut sejalan dengan Arifin (2017) yang menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar instansi dan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan.

Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas suatu program publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2003), evaluasi kebijakan berfungsi untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor

yang memengaruhi pencapaian tujuan program. Evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan hasil akhir, tetapi juga memahami proses pelaksanaan, hambatan, serta relevansi program terhadap kebutuhan sasaran.

Selain itu, Owen dan Rogers (1999, dalam Winaryati, 2021) menekankan bahwa keberhasilan evaluasi program sangat dipengaruhi oleh kejelasan desain program (*clarification*), interaksi antara pelaksana dan penerima manfaat (*interactive evaluation*), serta sistem *monitoring* yang aktif dan berkelanjutan (*monitoring evaluation*). Apabila salah satu dimensi tersebut lemah, maka program berisiko tidak mencapai sasaran atau kehilangan keberlanjutan. Sejalan dengan itu, Wirawan (2012) menyatakan bahwa evaluasi program harus berorientasi pada realitas sosial masyarakat sasaran, sebab keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari *output* administratif, tetapi juga dari perubahan perilaku dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengevaluasi hasil pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 pada pelaku usaha UMKM di Kelurahan Bulusan. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan lingkungan di tingkat lokal, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, partisipasi, dan keberlanjutan program pengelolaan sampah plastik.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono dalam bukunya Metodologi Penelitian Kebijakan (2016), metode penelitian merupakan langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan serta penggunaannya. Dari definisi tersebut terdapat empat unsur penting, yaitu bersifat ilmiah, berorientasi pada data, memiliki tujuan yang jelas, dan memberikan manfaat atau kegunaan tertentu.

Langkah ilmiah dalam penelitian mengandung arti bahwa proses penelitian harus memenuhi tiga kriteria, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti bahwa setiap langkah dalam penelitian dapat dijelaskan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Empiris berarti didasarkan pada fakta atau data yang dapat diamati secara nyata. Sementara itu, sistematis menunjukkan bahwa prosedur dalam penelitian harus disusun secara teratur dan logis (Sugiyono, 2016).

Dalam Metode Penelitian Administrasi Publik, Kismartini dan Yusuf (2023) menyebutkan beberapa tipe penelitian, antara lain:

- a. Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi yang sedang berlangsung. Penelitian ini menyajikan informasi melalui pengamatan, pencatatan, analisis, dan interpretasi terhadap situasi aktual. Tipe ini tidak menguji hipotesis, melainkan menyajikan informasi secara objektif (Ramdhan, 2021).

- b. Penelitian Eksploratif, yaitu jenis penelitian yang bersifat terbuka dan bertujuan mengeksplorasi suatu gejala atau permasalahan yang belum banyak diketahui. Penelitian ini sering digunakan sebagai tahap awal untuk menyusun penelitian yang lebih spesifik, seperti penelitian deskriptif (Ramdhan, 2021).
- c. Penelitian Eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Ramdhan, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena peneliti ingin memperoleh data dalam bentuk narasi, baik tertulis maupun lisan, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada informan yang relevan, khususnya pelaku UMKM serta pihak terkait di Kelurahan Bulusan.

Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara langsung dan menyeluruh, sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, metode ini dianggap paling sesuai untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Evaluasi Program Pengendalian Sampah Plastik dilakukan oleh Pelaku Usaha UMKM di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

1.10.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Menurut Kismartini dan Yusuf (2023), lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan pengumpulan data guna menangkap fenomena yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sehingga dapat menghasilkan informasi yang valid dan relevan. Penentuan lokasi menjadi salah satu langkah penting dalam penelitian kualitatif, karena dari lokasi tersebut, peneliti dapat menetapkan fokus objek serta arah tujuan penelitian. Dengan lokasi yang jelas, proses pengumpulan data menjadi lebih terarah dan efisien.

Penelitian kualitatif pada dasarnya membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial di suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memilih sektor UMKM di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansi antara karakteristik wilayah dengan topik penelitian, yaitu Evaluasi Program Pengendalian Penggunaan Plastik yang melibatkan pelaku usaha UMKM sebagai subjek utama yang berada langsung dalam lingkup kebijakan dan program pengelolaan sampah plastik.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan merupakan individu atau sekelompok orang yang dijadikan sumber informasi untuk memperoleh data, baik berupa fakta maupun pendapat. Menurut Arikunto (2016), subjek penelitian dapat berupa objek, hal, atau orang yang menjadi tempat melekatnya variabel yang sedang diteliti dan menjadi fokus kajian. Dalam pendekatan kualitatif, istilah yang umum

digunakan bukan “responden” melainkan informan, yaitu orang yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Menurut Kismartini dan Yusuf (2023), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, yakni informan dipilih karena dianggap memahami persoalan yang diteliti dan mampu memberikan informasi secara mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat (*key person*) dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik, yakni pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Bulusan, pengelola bank sampah, Aparatur Kelurahan Bulusan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Pemilihan subjek pelaku usaha UMKM difokuskan pada pelaku usaha yang menjadi sasaran utama Program Pengendalian Penggunaan Plastik berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019, yaitu yang terlibat langsung dalam aktivitas penggunaan kemasan plastik sekali pakai dalam kegiatan operasionalnya. Adapun kriteria pemilihan informan pelaku usaha UMKM ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Merupakan pelaku UMKM makanan atau minuman yang menggunakan kemasan plastik dan *styrofoam* dalam kegiatan operasionalnya.
- 2) Terdaftar di *platform* layanan pesan antar makanan *GoFood*.

- 3) Merupakan pelaku UMKM dengan tingkat penjualan tertinggi di wilayah Kelurahan Bulusan berdasarkan data publik yang tersedia di dalam aplikasi tersebut.
- 4) Bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi terkait evaluasi Program Pengendalian Penggunaan Plastik.

Pemilihan informan pelaku UMKM dengan kategori tersebut dilakukan untuk menjamin keterwakilan pelaku usaha yang memiliki aktivitas produksi dan distribusi tinggi, sehingga hasil evaluasi program dapat merefleksikan kondisi nyata dari kelompok penyumbang utama penggunaan plastik sekali pakai di Kelurahan Bulusan.

Sementara itu, pemilihan informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang difokuskan pada aparatur yang berada pada Bidang Pengelolaan Sampah karena memiliki peran langsung dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program, serta pembinaan kepada kelurahan dan masyarakat terkait pengendalian sampah plastik. Informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang dipilih merupakan aparatur dengan jabatan Pengawas Lingkungan Hidup yang terlibat secara langsung dalam pengawasan pelaksanaan program pada pelaku usaha, sehingga mampu memberikan informasi mengenai latar belakang Program Pengendalian Penggunaan Plastik, mekanisme pelaksanaan program, bentuk dukungan kepada kelurahan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi program di tingkat lapangan.

Adapun informan dari Aparatur Kelurahan Bulusan dilakukan kepada aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan dan pendampingan program di wilayah

Kelurahan Bulusan, yakni Sekretaris Kelurahan Bulusan. Informan tersebut dipilih karena memiliki pemahaman mengenai kondisi wilayah Kelurahan Bulusan, karakteristik pelaku UMKM setempat, serta bentuk koordinasi yang dilakukan antara Kelurahan Bulusan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang maupun pengelola bank sampah. Informasi dari pihak kelurahan diperlukan untuk menggambarkan bagaimana program diterjemahkan dan dilaksanakan di tingkat wilayah serta untuk mengetahui bentuk fasilitasi yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan dari pengelola Bank Sampah Tulip. Adapun informan yang dipilih menjabat sebagai Ketua Bank Sampah Tulip, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa posisi tersebut memiliki pemahaman paling menyeluruh mengenai kondisi, dinamika, serta peran bank sampah dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah di Kelurahan Bulusan. Bank Sampah Tulip dipilih sebab dalam periode 2025 akhir telah mengalami perubahan kondisi dari semi-aktif menjadi aktif kembali dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah di Kelurahan Bulusan. Kondisi tersebut dinilai relevan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika peran bank sampah dalam mendukung pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik, khususnya dalam menampung dan mengelola sampah plastik yang berasal dari masyarakat maupun pelaku UMKM.

Keterlibatan informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Aparatur Kelurahan Bulusan, dan pengelola Bank Sampah Tulip tersebut dimaksudkan untuk melengkapi perspektif evaluasi program dari sisi pembuat

kebijakan, pelaksana di tingkat wilayah, serta pendukung teknis di lapangan, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik secara menyeluruh.

Tabel 1.6 Subjek Penelitian

Keterangan	Jabatan
Informan 1	Pengawas Lingkungan Hidup
Informan 2	Sekretaris Kelurahan Bulusan
Informan 3	Pemilik UMKM Nasi Kuning Pasundan
Informan 4	Pemilik UMKM Burjo Saung Sara (SS) Gondang 5
Informan 5	Pemilik UMKM Burjo Senza
Informan 6	Ketua Bank Sampah Tulip

Sumber: Data yang dikelola oleh peneliti, 2026

1.10.4 Jenis Data

Menurut Kismartini dan Yusuf (2023), data di dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

a. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini dapat berupa kehidupan, riwayat, perilaku seseorang, peran organisasi, pergerakan sosial, hingga hubungan timbal balik. Adapun tujuannya adalah untuk memahami fenomena yang terjadi seperti persepsi, motivasi, perilaku, dan sebagainya.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan metode yang bersifat numerik atau angka-angka untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabelnya, dengan asumsi yang terdiri dari fakta dan data yang memiliki realitas objektif, variabel yang dapat diukur dan diidentifikasi, peristiwa yang dilihat dari sudut pandang pihak di luar informan, serta realitas kehidupan yang statis.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan, observasi langsung di lapangan yang didokumentasikan dalam bentuk foto, serta dokumentasi tertulis berupa literatur dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Evaluasi Program Pengendalian Sampah Plastik pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

1.10.5 Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal yang dapat memberikan informasi relevan untuk mendukung proses pengumpulan data dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2016), sumber data adalah subjek atau objek yang menyimpan informasi penting yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan jenisnya, sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Program Pengendalian Penggunaan Plastik. Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari dua kelompok sumber utama, yaitu:

- 1) Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, yang menjadi subjek utama penelitian. Data dari pelaku usaha ini digunakan untuk menilai aspek program berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian sampah plastik.
- 2) Informan pendukung yang terdiri atas beberapa pihak yang memiliki peran dalam implementasi kebijakan, yaitu:
 - a) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yang berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik di tingkat kota.
 - b) Aparatur Kelurahan Bulusan, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, koordinasi, serta sosialisasi kegiatan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan.

c) Pengelola Bank Sampah Tulip, yang berperan sebagai mitra teknis dalam kegiatan pilah dan pengumpulan sampah anorganik dari pelaku usaha UMKM dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau sumber tertulis yang sudah tersedia. Data tersebut tidak dikumpulkan langsung dari lapangan, melainkan berasal dari kajian literatur dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi berbagai regulasi dan referensi yang relevan dan mendukung penelitian, antara lain:

- 1) Peraturan dan kebijakan, seperti Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
- 2) Laporan dan data resmi, seperti data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengenai program pengendalian penggunaan plastik.
- 3) Sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas evaluasi kebijakan lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nurfajriani *et al.* (2024), pengumpulan data primer merupakan tahapan penting dalam penelitian karena melalui data inilah peneliti dapat memperoleh informasi langsung yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, terdapat beberapa teknik utama yang digunakan untuk menghimpun data, antara lain:

1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan, dimana peneliti mengajukan pertanyaan dan informan memberikan jawaban sesuai pengalaman dan pengetahuannya. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka maupun tidak langsung, tergantung pada situasi dan kebutuhan penelitian.

2) Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan kegiatan mengamati secara sistematis terhadap fenomena sosial atau peristiwa yang relevan dengan objek penelitian. Pasolong menyatakan bahwa observasi menjadi metode yang sah apabila sesuai dengan tujuan penelitian, dilakukan secara sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi validitas maupun reliabilitasnya.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari berbagai catatan, arsip, gambar, maupun dokumen lain yang merekam kejadian

atau aktivitas tertentu. Teknik ini berfungsi untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi dengan bukti pendukung yang tertulis atau terdokumentasi.

Senada dengan hal tersebut, Sugiyono (2016) menekankan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data yang valid dan relevan. Dalam pendekatan kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan pada situasi alamiah (*natural setting*), dengan sumber data primer dan menggunakan teknik seperti observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa informan kunci seperti Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, Pengelola Bank Sampah, Aparatur Kelurahan Bulusan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati perilaku pengelolaan sampah oleh pelaku usaha serta memanfaatkan dokumentasi berupa foto kegiatan, laporan, dan literatur pendukung sebagai data pelengkap.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Kismartini dan Yusuf (2023), analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat urutan, memanipulasi, serta meningkatkan temuan

data agar mudah dibaca dan bertujuan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif. Menurut Miles *et al.* (2014), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh. Proses ini melibatkan empat komponen utama, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan tahap awal penelitian untuk memperoleh informasi dan fakta empiris secara langsung dari lapangan. Proses ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memotret kondisi riil terkait dengan Evaluasi Program Pengendalian Penggunaan Plastik pada Pelaku UMKM Kelurahan Bulusan.

2) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses menyederhanakan, memilah, dan merangkum data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir analisis untuk menjabarkan temuan dan makna yang diperoleh. Kondensasi data difokuskan pada informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan Evaluasi Program Pengendalian Penggunaan Plastik pada Pelaku UMKM Kelurahan Bulusan.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi penelitian secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dan menentukan langkah analisis selanjutnya. Data tersebut ditata ke dalam format yang terstruktur, seperti matriks, tabel, grafik, jaringan, maupun bagan. Dengan demikian, peneliti dapat melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data serta memudahkan proses analisis menjadi lebih terarah dan kesimpulan yang dihasilkan menjadi lebih tepat.

4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung. Peneliti terus mencari pola, tema, serta hubungan dari kondensasi data untuk membentuk pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti. Kesimpulan akhir yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan terus diuji melalui pengumpulan data berikutnya. Apabila hasil temuan tetap konsisten, maka kesimpulan tersebut dianggap valid dan kredibel.

Melalui model analisis interaktif tersebut, peneliti dapat merumuskan kesimpulan yang akurat berdasarkan data observasi, dokumentasi, dan wawancara mengenai Evaluasi Program Pengendalian Penggunaan Plastik pada Pelaku

UMKM di Kelurahan Bulusan, sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini secara sistematis dan mendalam.

1.10.8 Kualitas dan Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, aspek kredibilitas menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurut Lincoln dan Guba (1985), sebuah penelitian dikatakan kredibel apabila peneliti mampu meyakinkan bahwa data yang diperoleh benar adanya dan telah diinterpretasikan secara akurat. Kredibilitas ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan valid.

Salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan langkah untuk menguji keabsahan data melalui perbandingan antarsumber atau teknik. Dengan menerapkan triangulasi, peneliti dapat memverifikasi konsistensi data yang diperoleh dari berbagai metode dan perspektif, sehingga informasi yang terkumpul menjadi lebih utuh, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, sebagaimana dijelaskan oleh Bandur (2014), sebagai berikut:

1) Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk mengkaji permasalahan yang sama. Dalam hal ini, peneliti menggabungkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Penggunaan teknik yang beragam ini membantu

memperkuat hasil temuan dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih luas serta mendalam terhadap Evaluasi Program Pengendalian Penggunaan Plastik di tingkat Pelaku UMKM Kelurahan Bulusan.

2) Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan atau sumber informasi yang berbeda. Informasi tersebut dikumpulkan dari Pelaku UMKM Kelurahan Bulusan, Aparatur Kelurahan Bulusan, serta pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Selain itu, dokumen-dokumen pendukung seperti peraturan daerah, laporan kegiatan, dan catatan dokumentasi visual juga digunakan untuk memperkaya dan membandingkan informasi dari sumber primer.

Selanjutnya, peneliti juga menerapkan prinsip triangulasi seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2018), yaitu dengan membandingkan pernyataan publik dengan pernyataan personal, serta mengkaji kembali data dengan dokumen atau catatan yang relevan. Selain itu, perbandingan juga dilakukan berdasarkan latar belakang sosial dan kedudukan informan untuk memahami beragam sudut pandang yang muncul di lapangan. Dengan menggunakan kombinasi kedua bentuk triangulasi, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat valid dan mencerminkan realitas di lapangan terkait dengan Evaluasi Program Pengendalian Penggunaan Plastik pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.